

## **SKRIPSI**



# **PERANAN HAKIM DALAM MENGIDENTIFIKASIKAN CEKCOK TERUS-MENERUS YANG TIDAK DAPAT DIDAMAIKAN LAGI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PROSES PERADILAN AGAMA**

**OLEH:**

**JUMINARTO MIRAJAD KAMARUDDIN  
B111 10 305**

**BAGIAN HUKUM ACARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2014**

**HALAMAN JUDUL**

**PERANAN HAKIM DALAM MENGIDENTIFIKASIKAN CEKCOK  
TERUS-MENERUS YANG TIDAK DAPAT DIDAMAIKAN LAGI  
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM  
PROSES PERADILAN AGAMA**

**Oleh:**

**JUMINARTO MIRAJAD KAMARUDDIN  
B111 10 305**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana dalam Program Bagian Hukum Acara  
Program Studi Ilmu Hukum**

**BAGIAN HUKUM ACARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2014**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**


### **PERANAN HAKIM DALAM MENGIDENTIFIKASIKAN CEKCOK TERUS-MENERUS YANG TIDAK DAPAT DIDAMAIKAN LAGI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PROSES PERADILAN AGAMA**

Disusun dan diajukan oleh  
**JUMINARTO MIRAJAD KAMARUDDIN**  
**B111 10 305**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 27 Februari 2014  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**


**Ketua**

  
**Prof. Dr. Aburaera, S.H.**  
NIP. 19430310 197302 1 001

**Sekretaris**

  
**M. Ramli Rahim, S.H., M.H.**  
NIP. 19530727 198103 1 007

**A.n. Dekan**  
**Wakil Dekan Bidang Akademik,**

  
**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Juminarto Mirajad Kamaruddin**

Nomor Pokok : **B111 10 305**

Bagian : **Acara**

Judul Skripsi : **Peranan Hakim dalam Mengidentifikasi  
Cekcok terus-menerus yang tidak dapat  
didamaikan lagi sebagai alasan perceraian  
dalam proses peradilan agama**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2014

Pembimbing I



**Prof. Dr. Aburdera, S.H.**  
NIP. 19430310 197302 1 001

Pembimbing II



**M. Ramli Rahim, S.H., M.H.**  
NIP. 19530727 198103 1 007

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Juminarto Mirajad Kamaruddin**

Nomor Pokok : **B111 10 305**

Bagian : **Acara**

Judul Skripsi : **Peranan Hakim dalam Mengidentifikasi  
Cekcok terus-menerus yang tidak dapat  
didamaikan lagi sebagai alasan perceraian  
dalam proses peradilan agama**

Memenuhi syarat dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai  
ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2014

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## **ABSTRACT**

**JUMINARTO MIRAJAD KAMARUDDIN, B111 10 305, *The Roles of Judges in Identifying Irreconcilable Differences As the Reason of Divorce in Islamic Court (Advised by Sukarno Aburaera as The 1<sup>st</sup> Advisor and H.M. Ramli Rahim as The 2<sup>nd</sup> Advisor)***

*This research aims to identify Irreconcilable Differences' standing as the reason of divorce in Islamic Court; and also to describe the roles of judges in identifying Irreconcilable Differences as the reason of divorce in Islamic Court.*

*This qualitative-descriptive research was done with field research and literature research method, by interview and content analysis for collecting the data, which results primary and secondary data and processed by qualitative analytic technical. This research was located in Islamic Court of Makassar, in Makassar City, Province of South Sulawesi.*

*As the results of this research, writer concludes that irreconcilable differences is the dominant reason which excessively used in divorce case in Islamic Court. The roles of judges in investigating divorce case are: (a) Identifying the least of goal/purpose of marriage; (b) Providing advice along the trial; (c) Assessing the verification of the divorce's reasons petition, especially about the irreconcilable differences; (d) Assessing the worthiness of the marriage and trying the peace efforts along the trial. Other results are some factors and indicators which influence the judgments to decide divorce case because of irreconcilable differences, such as: (a) The evidence of irreconcilable differences, physically and mentality; (b) Conflict or dispute was seen by its fact, not the reason; (c) Achievement of marriage's purpose and the probability to carry on the marriage; (d) Intensity of the conflict or dispute; (e) Length of the separation/divorce (not living together anymore); (f) Interaction; (g) Desire of one party or both to be separated; (h) Readiness to be changed for continuing the marriage; and (i) Maturity and child's will.*

**Keywords** : Marriage; Divorce; Reason of Divorce; Dispute;  
Irreconcilable differences

## ABSTRAK

**JUMINARTO MIRAJAD KAMARUDDIN, B111 10 305, Peranan Hakim dalam Mengidentifikasi Cekcok Terus - Menerus yang Tidak Didamaikan Lagi sebagai Alasan Perceraian dalam Proses Peradilan Agama (Dibimbing oleh Sukarno Aburaera selaku Pembimbing I dan H.M. Ramli Rahim selaku Pembimbing II)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagai alasan perceraian dalam proses peradilan agama; serta untuk mengetahui peranan hakim dalam mengidentifikasi cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi tersebut sebagai alasan perceraian dalam proses peradilan agama.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang ditunjang dengan penelitian kepustakaan (*literature research*), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta analisis dokumen (*content analysis*), yang menghasilkan data primer dan data sekunder yang diolah dengan teknik analisis kualitatif berbasis paradigma hukum. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi merupakan alasan yang paling dominan digunakan dalam perkara perceraian dalam proses Peradilan Agama. Dimana peranan hakim dalam pemeriksaan perkara perceraian pada Peradilan Agama tersebut, antara lain: (a) Mengidentifikasi tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan; (b) Memberikan nasihat-nasihat selama persidangan; (c) Menilai pembuktian alasan perceraian yang diajukan, khususnya unsur cekcok terus-menerus; dan (d) Menilai kelayakan dapat diteruskan atau tidaknya ikatan perkawinan, serta melakukan upaya pendamaian selama persidangan. Juga bahwa terdapat faktor-faktor atau indikator-indikator yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan percekcoan terus-menerus, yakni: (a) Terbuktinya alasan percekcoan terus-menerus, baik secara fisik maupun psikis; (b) Percekcoan bukan dilihat dari penyebabnya, tapi kenyataannya; (c) Tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan dan kemungkinan diteruskannya perkawinan tersebut; (d) Intensitas terjadinya cekcok; (e) Lamanya perpisahan (tidak tinggal bersama); (f) Masih atau tidaknya lagi ada hubungan; (g) Keinginan salah satu atau kedua belah pihak untuk berpisah; (h) Kesiediaan untuk berubah demi meneruskan rumah tangga; dan (i) Kematangan suami-isteri dan faktor anak.

**Kata Kunci** :Perkawinan, Perceraian, Alasan Perceraian, Cekcok Terus-menerus

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur tercurah kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Hakim dalam Mengidentifikasi Cekcok Terus-Menerus yang Tidak Dapat Didamaikan Lagi sebagai Alasan Perceraian dalam Proses Peradilan Agama” ini tepat waktu, guna memenuhi persyaratan penyelesaian studi Program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda Kamaruddin, S.Sos dan Ibunda Bulaeng serta keluarga penulis. kakak-kakak penulis: Jukas Mirnoto, Juanda Karta Wijaya, Jasmin Mudianto, Sri Maryati Kamaruddin, Sri Husnaeni Kamaruddin, dan Juanedi Akbar Kamaruddin. Terima kasih atas berbagai jerih payah, dedikasi, doa, perhatian, dan segala hal yang sangat membangun penulis hingga saat ini. Tidak akan ada tara yang setimpal bagi penulis untuk membalas, tapi semoga Allah senantiasa menaungi, mencurahkan rahmat yang tak pernah putus untuk kita semua. Terima kasih telah menjadi ‘tempat pulang’ penulis dalam hidup ini.



Selama proses studi, terlebih dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan begitu banyak sumbangsih dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.Bo selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajaran Wakil Dekan dan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Ketua dan Sekreratis Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Syukri Ayyub, S.H., M.H., dan Ibu Andi Syahwiah, S.H., M.H. ;
4. Bapak Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H dan Bapak H.M. Ramli Rahim, S.H., M.H., selaku pembimbing, serta Bapak Achmad, S.H., M.H., Ibu Fauziah P. Bakti, S.H., M.H., dan Ibu Rastiawaty S.H., M.H., selaku penguji ujian akhir penulis;
5. Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unhas sekaligus dosen yang ‘membumi lapang’, memberi ruang untuk terus berkembang, mengajarkan arti dalam banyak hal, dan membimbing dalam berbagai ihwal;
6. Ibu Marwah, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik Penulis, yang banyak memberikan tuntunan langkah selama proses studi penulis;

7. Kawan-kawan Angkatan Legitimasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang meski tak setempo akhirnya, namun tak pernah minor dalam kekerabatannya;
8. Para senior dan rekan-rekan UKM Sepak Bola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah menjadi 'rumah' kedua bagi penulis selama studi. *Viva The Yellow Submarine*.
9. Sahabat-sahabat pena Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Unhas. Terima kasih telah mengajarkan cara mengukir cerita hidup. KIPAS (Kita Pasti Bisa), pacu kreativitas dan raih prestasi!
10. Para Bombers Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) Universitas Hasanuddin, terkhusus untuk kak Dian Utami Bas Bakar dan Kak Yutirsa Yunus, serta Delegasi Debat Hukum Padjadjaran Law Fair: Muh. Aril Surya Ananda, Muh. Asphian Arwin, Arini Nur Annisa, Rizal, dan Afdalis. Semoga karsa kita sekarang akan menjadi sesuatu yang elok untuk diceritakan kembali di masa mendatang. Perdebatan memang akan selalu identik dengan perbedaan, tapi di dalam perbedaan itulah kita hidup dan menyatu. Terima kasih banyak ;
11. Para Hakim dan Panitera Mahkamah Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tidak panjang waktunya, tapi itu cukup untuk membuktikan bahwa kita ada. Terima kasih telah menjadikan penulis sebagai bagian dalam masa pembuktian itu;

12. Generasi pertama LDHKMI (Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia), khususnya delegasi Universitas Hasanuddin pada Konsolidasi II, Muh. Ridwan Saleh, St. Dwi Adiyah Pratiwi, serta Wahyudi Kasrul. Terima kasih telah menorehkan nama penulis dalam salah satu bagian sejarah LDHKMI. Teruslah berkembang;
13. Generasi Komunitas Indonesia Berjiwa Empat Pilar (KIB4R), semoga kembali menemukan jalannya untuk memberikan dedikasi kepada pembangunan bangsa;
14. Rekan-rekan Tim Jack'D 2010, Bis Besar, serta SPP yang menjadi rekan tim Penulis selama mengikuti Liga Hukum. Meski tanpa trofi, kebahagiaan bermain sepak bola selalu memberi sensasi tersendiri;
15. Keluarga Besar KKN Unhas Gelombang 85, Kecamatan Khusus Miangas, terkhusus untuk partner Penulis, Maryono Joko serta Keluarga Sakaluda di Miangas. Terima kasih banyak telah mengajarkan begitu banyak dedikasi, arti hidup, cinta, dan cita. Jangan berhenti untuk terus menebar inspirasi;
16. Para Narasumber, Hakim, Panitera, dan Pegawai di Pengadilan Agama Makassar yang sangat membantu penulis selama proses penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas sikap kooperatif dan berbagai dorongan inspiratif untuk penulis;
17. Seluruh civitas akademika Universitas Hasanuddin, Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas dan Perpustakaan

Pusat Unhas, serta kawan-kawan organisatoris lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Unhas;

18. Sahabat-sahabat penulis yang banyak menemani selama studi, khususnya Irsan Ismail dan Muhammad Hidayat yang banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir penulis; dan

19. Seluruh pihak yang telah turut membantu selama proses studi dan penyelesaian tugas akhir penulis di Universitas Hasanuddin, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari skripsi ini masih berada jauh dari titik kesempurnaan, namun penulis berharap di tengah ketidaksempurnaan itu, skripsi ini tetap mampu memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Terima kasih. *Wassalam*.

Makassar, Februari 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRACT .....	v
ABSTRAK .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Hakim .....	15
1. Pengertian Hakim .....	15
2. Tugas Hakim .....	16
3. Asas-asas Terkait Tugas Hakim dalam Perkara	
Perdata .....	20

B. Perceraian .....	26
1. Pengertian Perceraian .....	26
2. Jenis-jenis Perceraian .....	29
3. Alasan Perceraian .....	33
4. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Perceraian .....	35
C. Cekcok Terus-Menerus yang Tidak Dapat Didamaikan Lagi ( <i>Onheelbare Tweespalt</i> ) .....	41
1. Pengertian Cekcok Terus-Menerus yang Tidak Dapat Didamaikan Lagi ( <i>Onheelbare Tweespalt</i> ) .....	41
2. Perbandingan Cekcok Terus-Menerus yang Tidak Dapat Didamaikan Lagi ( <i>Onheelbare Tweespalt</i> ) dengan <i>Syiqaq</i> dalam Hukum Islam .....	44
D. Wewenang/Kompetensi Peradilan Agama .....	50
1. Kompetensi Relatif .....	51
2. Kompetensi Absolut .....	54
<b>BAB III METODE DAN LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>60</b>
A. Lokasi Penelitian .....	60
B. Jenis dan Sumber Data .....	60
C. Teknik Pengumpulan Data .....	61
D. Analisis Data .....	62
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Kedudukan ‘Cekcok Terus-Menerus yang Tidak	

Dapat Didamaikan Lagi' sebagai Alasan Perceraian .....	63
B. Peranan Hakim dalam Mengidentifikasi Cekcok	
Terus-Menerus yang Tidak Dapat Didamaikan Lagi	
sebagai Alasan Perceraian dalam Proses Peradilan Agama .	86
1. Peranan Hakim dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian	
pada Peradilan Agama .....	88
2. Indikator yang Memengaruhi Putusnya Perceraian	
dengan Alasan 'Cekcok Terus-Menerus yang Tidak	
Dapat Didamaikan Lagi' oleh Hakim Peradilan Agama ...	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>111</b>

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1:** Jumlah Perkara Masuk pada Pengadilan Agama

Tingkat Pertama di Indonesia Tahun 2010 .....	68
---	----

**Tabel 2:** Jumlah Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama

Makassar Tahun 2012 dan 2013 .....	70
------------------------------------	----

**Tabel 3:** Faktor-faktor Penyebab Perceraian pada Pengadilan

Agama Makassar Tahun 2012 dan 2013 .....	78
--	----

**Tabel 4:** Faktor Penyebab terjadinya Percekcokan Terus-

Menerus dalam Perkara Perceraian yang Diterima	
pada Pengadilan Agama Makassar tahun 2012-2013 .....	82



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1:</b> Surat Keterangan Izin Penelitian .....	112
<b>Lampiran 2:</b> Daftar Nama Responden Penelitian .....	113
<b>Lampiran 3:</b> Laporan yang Diputus pada Pengadilan Agama Makassar Bulan Januari s/d Desember 2012 .....	114
<b>Lampiran 4:</b> Laporan yang Diputus pada Pengadilan Agama Makassar Bulan Januari s/d Desember 2013 .....	115
<b>Lampiran 5:</b> Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Makassar Bulan Januari s/d Desember 2012 .....	116
<b>Lampiran 6:</b> Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Makassar Bulan Januari s/d Desember 2013 .....	117

*“... ketika sebuah rumah tangga tetap dipertahankan apakah akan berdampak buruk atau tidak, semuanya itu tergantung penilaian hakim agama.”*

*-- Anwar Usman*

*(Hakim Mahkamah Konstitusi RI)*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Eksistensi manusia di bumi merupakan hasil berkesinambungan dari proses regenerasi keturunan yang berlangsung secara terus-menerus dalam ikatan keluarga yang diraih melalui perkawinan. Hal ini tidak terlepas dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain guna memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat lahiriah maupun rohaniah.

Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politikon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi<sup>1</sup>. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama tersebut dimulai dengan adanya keluarga sebagai organisme sosial (*social organism*) yang terbentuk dari proses perkawinan. Hakikat manusiawi tersebut juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yang menyatakan bahwa<sup>2</sup>:

“Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.”

---

<sup>1</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung, 1991), Hal. 1

<sup>2</sup>*Ibid.* Hal. 3

Esensi pembentukan keluarga merupakan implikasi dari nilai pentingnya arti sebuah perkawinan. Secara sosiologis, Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia juga mengakui perkawinan sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan<sup>3</sup>.

Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya dan bernilai ibadah. Karena itu, mereka yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah beliau, sebagaimana sabdanya yang berarti:

“Pernikahan adalah Sunnahku, barangsiapa yang mengingkari sunnahku maka ia bukan dari golonganku. (HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.)”

Berbagai arti penting tersebut menjadi dasar diakuinya perkawinan dan melanjutkan keturunan sebagai hak dasar atau hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati. Hak tersebut secara universal diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) artikel/pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama, berhak untuk menikah dan untuk

---

<sup>3</sup> Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Jakarta, 2005), Hal.3

membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.

Dalam hukum nasional Indonesia, hak menyangkut perkawinan diatur secara mendasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang merumuskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dasar konstitusional inilah yang menjadi rujukan bagi regulasi turunannya untuk mengatur lebih jauh mengenai perkawinan. Salah satu yang utama, yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) dan juga Kompilasi Hukum Islam Buku Pertama yang dilegitimasi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pengertian tersebut terkandung muatan bahwa tujuan dilakukannya perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Demikian halnya dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam hal ini, pernikahan yang dijalin dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, yakni keluarga yang para anggotanya merasakan kehidupan

yang damai. Hubungan-hubungan emosional dan komunikasi di antara mereka terjalin dengan mesra tanpa hambatan psikologis. Para anggota keluarga tersebut dapat menikmati hak-haknya secara baik sekaligus dapat menjalankan kewajibannya-kewajibannya secara baik pula.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*miitsaaqan gholiidhan*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan<sup>5</sup>. Perkawinan yang juga diartikan sama dengan pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga<sup>6</sup>. Sebagai sesuatu yang suci dan sakral, perkawinan hendaknya dilakukan dengan tujuan yang luhur dan suci pula. Guna memelihara sakralitas (kemuliaan, kesucian) perkawinan tersebut, senantiasa perlu diciptakan suasana harmonis yang bersifat kontinyu (terus-menerus) dalam kehidupan keluarganya sehingga perkawinan tersebut tetap lestari dan bermanfaat.

Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara suami dan isteri, melainkan juga menjalin hubungan antara keluarga kedua belah pihak. Suami dan isteri menyatu dalam rumah tangga dengan segala macam dinamika kehidupan di dalamnya. Suka duka kehidupan keluarga yang menyertai kehidupan suami isteri, harus mereka jalani bersama. Dalam proses inilah kadangkala terjadi goncangan-goncangan hebat yang tidak

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal. 9

<sup>5</sup> Andi Syamsu Alam. Op.cit. Hal.10

<sup>6</sup> Anwar Harjono, dikutip dalam Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta, 2009) Hal. 47

jarang dapat menyebabkan hancurnya kehidupan rumah tangga yang berujung pada terjadinya perceraian. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa keluarga yang bahagia dan kekal pada dasarnya membutuhkan kesepakatan dan kesepakatan antara dua pihak, yakni suami dan isteri. Jika salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak sepakat dan tidak mampu saling memahami lagi, maka ikatan rumah tangga tersebut bisa putus melalui perceraian.

Sama halnya dengan perkawinan, perceraian di Indonesia tidak hanya diatur oleh hukum nasional melainkan juga oleh hukum Islam serta hukum adat setempat. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) dan (2) dirumuskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian<sup>7</sup>. Dimana sekalipun terjadi persetujuan antara pihak suami dan isteri, tetap dibutuhkan alasan yang logis agar persetujuan tersebut dapat dikabulkan untuk menjadi perceraian oleh majelis hakim pengadilan bersangkutan. Demikian halnya dalam Islam yang ditunjukkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 19 dan Hadits

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta, 2006), Hal. 400

Rasulullah<sup>8</sup> yang menyatakan perceraian adalah perkara halal, tetapi dibenci oleh Allah SWT<sup>9</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami isteri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya<sup>10</sup>.

Ketentuan mempersulit proses perceraian tersebut menjadi hal yang urgen mengingat dalam kenyataannya di masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan perceraian dan bahkan tampaknya hal tersebut cenderung dilakukan dengan mudah. Ketidakharmonisan yang terjadi cenderung langsung diselesaikan dengan perpisahan atau perceraian tanpa upaya maksimal untuk mempertahankan ikatan suci tersebut.

Fenomena tingginya angka perceraian di Indonesia ditunjukkan dalam data yang dikeluarkan oleh Peradilan Agama (PA), yakni bahwa jumlah perkara secara nasional pada 2010 mencapai 314.354 tingkat pertama. Bidang perceraian mencapai 284.379, dari jumlah tersebut cerai gugat mendominasi mencapai 190.280. Angka tersebut lebih menonjol

---

<sup>8</sup> Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh AbuDaud, Ibn Majah, dan Al-Hakim, menyebutkan bahwa "Sesuatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian" Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta, 2012) Hal. 73

<sup>9</sup>Bernard MT, "UU Perkawinan Tak Melindungi Perempuan", <http://forum.kompas.com/keluarga/42686-uu-perkawinan-tak-melindungi-perempuan.html> (Diakses pada 18 November 2013 Pkl. 09.51 WITA)

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*



dibanding cerai talak yang mencapai 94.099<sup>11</sup>, yang ditegaskan kembali oleh Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang mengatakan angka perceraian di tanah air mencapai 212.000 kasus setiap tahunnya<sup>12</sup>.

Perihal pengaturan tentang perceraian, dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sebagai pengulangan bunyi Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat uraian tentang alasan-alasan perceraian yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip mempersulit terjadinya perceraian.

Alasan-alasan perceraian tersebut, yaitu: (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

---

<sup>11</sup> Damanhuri Zuhri "Wamenag: Angka Perceraian Masih Tinggi" (Agustus, 2013) <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/08/17/mrnkhr-wamenag-angka-perceraian-masih-tinggi> (Diakses pada 18 November 2013 Pkl. 10.00 WITA)

<sup>12</sup> Edi Supriyadi, "Angka Perceraian di Indonesia capai angka 212.000 pertahun" (September 2013) <http://www.antarajambi.com/berita/301375/angka-perceraian-di-indonesia-capai-angka-212000-pertahun> (Diakses pada 18 November 2013 Pkl. 10.04 WITA)

serta (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Salah satu alasan yang sering menimbulkan perdebatan adalah penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf *f* Undang-Undang Perkawinan, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Menurut ketentuan ini, jika suami dan isteri cekcok terus menerus dan tidak mungkin rukun kembali, salah satu atau kedua belah pihak bisa mengajukan cerai. Alasan inilah yang disebut dengan *Onheelbare Tweespalt*. Banyak pihak yang menganggap bahwa dikabulkannya perceraian disebabkan alasan ini merupakan hal yang relatif dan bahkan bersifat 'karet' karena tidak memiliki tolok ukur yang baku, sehingga cenderung mudah untuk diajukan di depan persidangan.

Fenomena tersebut ditunjukkan dalam beberapa kasus perceraian, misalnya dalam kasus perceraian antara Halimah dan Bambang Trihatmodjo putra mantan Presiden Soeharto yang banyak menyita perhatian publik pada 23 Desember 2010 lalu, yang memutuskan ikatan perkawinan di antara mereka dengan alasan ketidakcocokan atau tidak rukun (*Onheelbare Tweespalt*). Sementara Halimah, yang berusaha mempertahankan perkawinan, "tak berdaya" untuk tunduk pada keputusan perceraian tersebut<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Bernard MT. *Loc.cit.*

Hal inilah yang memicu diajukannya gugatan oleh Halimah Agustina ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 untuk menghapuskan Pasal 39 ayat (2) huruf *f* Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, meski pada akhirnya gugatan ini ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Moh. Mahfud MD dengan pertimbangan utama bahwa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut memang merupakan salah satu alternatif jalan keluar bilamana perkawinan tidak mampu lagi mencapai tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Meskipun demikian, hal menarik justru mencuat dalam pendapat yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman yang menyatakan bahwa ketika sebuah rumah tangga tetap dipertahankan apakah akan berdampak buruk atau tidak, semuanya itu tergantung penilaian hakim agama<sup>14</sup>. Pandangan ini jelas menunjukkan bahwa perihal dikabulkannya perceraian oleh hakim merupakan hal yang relatif bergantung pada bagaimana hakim yang menangani perkara tersebut melihatnya.

Demikian halnya dengan perkara perceraian yang disebabkan oleh perselisihan atau cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dimana hal tersebut bergantung dari penilaian hakim untuk menentukan sesuai tidaknya alasan tersebut dipergunakan untuk memutus perceraian ataukah ada alasan lain yang lebih sesuai, juga apakah memang percekcoakan tersebut tidak akan dapat didamaikan kembali sehingga

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

harus segera diceraikan atau masih ada upaya lain yang dapat dilakukan untuk mempertahankan perkawinan tersebut.

Cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*Onheelbare Tweespalt*) pada dasarnya merupakan alasan yang meletakkan persamaan hak antara suami dan isteri dalam hal keduanya atau salah satunya merasa bahwa ikatan perkawinan mereka tidak dapat lagi dipertahankan karena cekcok yang terjadi terus-menerus. Namun, jika diamati lebih mendalam, *Onheelbare Tweespalt* dapat menjadi sebuah alasan yang merupakan sebab atau akibat dari alasan perceraian lainnya. Misalnya, karena salah satu pihak zina atau tidak memenuhi kewajibannya dalam keluarga sebagaimana mestinya, mulai timbul percekcoakan yang berlarut-larut sehingga akhirnya tidak dapat lagi didamaikan. Atau misalnya karena percekcoakan yang berlarut-larut, sampai terjadi penganiayaan di dalamnya yang menyebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya.

Dengan kata lain, cekcok terus-menerus dapat merujuk kepada kesalahan oleh salah satu pihak (*personae*) saja, misalnya karena suami atau isteri yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Sehingga ada peluang hal ini hanya dijadikan alasan pembenar atau pemulus jalan bagi salah satu pihak yang ingin mengakhiri tanggung jawab ikatan perkawinannya secara sepihak.

Hal ini pulalah yang terjadi dalam kasus Halimah Agustina tadi, yang memandang bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Bambang

Trihatmodjo pada awalnya berjalan cukup baik, serasi dan harmonis, hingga selanjutnya timbul perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh adanya hubungan gelap (*backstreet*) antara Bambang Trihatmodjo dan perempuan lain, yang menyebabkan pihak suami tidak lagi mengasahi isteri dan anak-anaknya, berperilaku kasar dan kejam, tidak memberi nafkah, dan meninggalkan rumah. Bambang Trihatmodjo kemudian mengajukan permohonan cerai (talak) terhadap Halimah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan alasan antara Pemohon dan suami Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan rumah tangga mereka tidak ada harapan akan hidup rukun lagi<sup>15</sup>.

Poin kasus tersebut menunjukkan bahwa cekcok terus-menerus (*Onheelbare Tweespalt*) juga dapat merujuk pada alasan-alasan perceraian lainnya, sehingga majelis hakim yang memutus perkara tersebut harus benar-benar jeli dalam melihat apakah perceraian tersebut terjadi karena *Onheelbare Tweespalt* atau karena alasan perceraian lainnya dan apakah memang perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi ataukah hanya menjadi alasan sepihak untuk memutuskan ikatan perkawinannya.

Hal ini menjadi penting karena pada akhirnya, mengabulkan perceraian dengan alasan yang berbeda akan memberi implikasi yang

---

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 38/PUU-IX/2011. Hal.5 [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) (Diakses pada 18 November 2013 Pkl. 09.35 WITA)

berbeda pula, baik secara psikologis, sosiologis, maupun materil. Implikasi berbeda tersebut potensial terjadi apabila dalam gugatan perceraian yang diajukan, pemohon dalam petitumnya mengajukan permohonan agar hakim melihat *nusyuz* atau pihak yang bersalah penyebab terjadinya perceraian untuk menentukan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi setelah perkawinan berakhir, misalnya menyangkut pemenuhan nafkah iddah, mut'ah, dan sebagainya.

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa keterbatasan rincian aturan dalam mengajukan gugatan cerai atas alasan terjadinya cecok atau pertengkaran terus-menerus pada peradilan di Indonesia, khususnya dalam lingkup Peradilan Agama, telah menjadi celah hukum bagi para pihak karena tidak adanya ukuran dan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan unsur "cekcok" atau "perselisihan/pertengkaran" serta parameter apa yang digunakan untuk mengukur konteks "terus menerus" sebagai unsurnya.

Ukuran-ukuran dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diserahkan pada subjektifitas pertimbangan hakim semata, tanpa ada norma aturan yang menjadi pedomannya. Dalam praktiknya, hal ini cenderung mempermudah proses perceraian, yang jelas bertentangan dengan nilai luhur perkawinan yang harusnya bersifat kekal dan sejahtera. Selain itu, salah satu pihak, baik suami maupun istri, dapat memanfaatkannya untuk mengajukan gugatan cerai yang berdampak pada dirugikannya pihak lainnya. Dalam hal inilah menjadi menarik bagi

penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana peranan hakim dalam proses peradilan, khususnya peradilan agama untuk mengidentifikasi alasan perceraian karena cecok terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang selanjutnya menjadi bahasan dalam karya tulis ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan cecok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*Onheelbare Tweespalt*) sebagai alasan perceraian?
2. Bagaimanakah peranan hakim dalam mengidentifikasi cecok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*Onheelbare Tweespalt*) sebagai alasan perceraian dalam proses peradilan agama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian berkaitan bahasan dalam karya tulis ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan cecok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*Onheelbare Tweespalt*) sebagai alasan perceraian;

2. Untuk mengetahui peranan hakim dalam mengidentifikasi cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*Onheelbare Tweespalt*) sebagai alasan perceraian dalam proses peradilan agama.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh melalui penelitian ini, antara lain:

1. Menjadi rujukan bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian di pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan alasan perceraian berupa cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*);
2. Menjadi bahan pembelajaran bagi pembaca untuk lebih memahami mengenai tata cara beracara menyangkut perkara perceraian dalam proses peradilan agama, khususnya menyangkut *Onheelbare Tweespalt*; dan
3. Menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk lebih menjaga kelestarian keluarganya agar senantiasa menjadi keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hakim

##### 1. Pengertian Hakim

Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu "*hakim*", yang berarti orang yang memberi putusan atau diistilahkan juga dengan "*qadhi*". Hakim juga berarti orang yang melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas mencegah seseorang dari kedzaliman. Kata hakim dalam pemakaiannya disamakan dengan *Qadhi* yang berarti orang yang memutus perkara dan menetapkan. <sup>16</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hakim diartikan sebagai orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah); juri; atau penilai<sup>17</sup>. Sedangkan menurut Undang-Undang Peradilan Agama, Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam persoalan bagi rakyat. Dari padanya diharapkan

---

<sup>16</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) Dikutip dalam Mushlih Al-Hafizh, "Pengertian Hakim", <http://www.referensimakalah.com/2013/07/pengertian-hakim.html> (Diakses pada 21 November 2013 Pkl. 12.05 WITA)

<sup>17</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008) Hal. 503.

pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa. Diharapkan hakim sebagai orang yang bijaksana, aktif dalam pemecahan masalah.

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan<sup>18</sup>. Berkenaan dengan hal itu, muncullah idealisasi serta preskripsi-preskripsi tentang hakim. Di kalangan fuqaha, terdapat beraneka ragam pandangan tentang persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim, termasuk di antaranya tentang kemampuan berijtihad. Di Indonesia, idealisasi hakim itu tercermin dalam simbol-simbol *kartika* (takwa), *cakra* (adil), *candra* (berwibawa), *sari* (berbudi luhur), dan *tirta* (jujur).<sup>19</sup>

## 2. Tugas Hakim

Untuk menegakkan hukum yang bersendikan nilai-nilai keadilan atas segala aspek dalam tatanan kehidupan sosial, maka dalam negara hukum (*rechtstaat*) menjadi salah satu elemen atau unsurnya yakni independensi dan kemerdekaan badan-badan peradilan dalam menjalankan tugas di bidang kekuasaan kehakiman. Independensi itu artinya adanya kemandirian dari badan-badan peradilan negara terlepas

---

<sup>18</sup> Cik Hasan Bisri, MS. *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta, 2000) Hal. 193-194

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal. 194

dari badan kenegaraan lainnya. kemerdekaan diwujudkan oleh hakim yang dalam menjalankan fungsi yudisialnya terlepas dan bebas dari pengaruh-pengaruh dan campur tangan badan kekuasaan lainnya<sup>20</sup>.

Peranan hakim yang besar telah melahirkan konsekuensi bahwa hakim harus mampu mengakomodir persolan-persoalan hukum yang diajukan kepadanya untuk diberikan penyelesaian, dituntut memiliki wawasan ilmu dan pengetahuan hukum yang luas agar mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat baik itu hukum dalam arti aturan perundangan maupun di luar dari pada itu, supaya putusan yang dijatuhkan dalam rangka penyelesaian perkara konkret yang diajukan kepadanya terselesaikan dengan tidak mengabaikan pencerminan idealisme hukum dan keadilan.

Hakim dalam menjalankan tugas kehakiman dengan fungsi yudisialnya, dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara atau sengketa yang diajukan kepadanya sadar atau tidak, telah melakukan penemuan hukum dari suatu sumber hukum baik itu dari sumber hukum yang tertulis maupun yang tidak, sehingga bilamana putusan yang dicetuskannya dari hasil penemuan hukum itu mengandung asas-asas hukum dan memperoleh kekuatan berlaku umum, maka lahirlah hukum sebagai hukum bentukan hakim (*judge made law*) yang dalam istilah lain biasa pula disebut *rechtsvorming*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nurul Qamar, *Percikan Pemikiran tentang Hukum* (Makassar, 2011) Hal. 40

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal.42

Memang banyak masalah-masalah perdata yang timbul, tapi ternyata belum ada peraturan perundang-undangnya yang mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim perlu diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang lebih dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian, tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam peradilan perdata, tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara<sup>22</sup>. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas pokok hakim seperti yang dimaksudkan tersebut merupakan relevansi daripada ketentuan yang telah ditentukan oleh Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tugas hakim tidak hanya berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi

---

<sup>22</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta, 2002) Hal. 13

juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan pasal 4 ayat 2 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berhubungan dengan tugas-tugas tersebut, oleh para penulis ahli hukum dipersoalkan, seberapa jauh hakim harus mengejar kebenaran (*waarheid*) di dalam proses. Di dalam acara perdata, seringkali orang menganggap cukup didapatkan kebenaran formil, berlainan dari pada acara pidana, yang menentukan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran formil ini bukan kebenaran setengah atau kebenaran yang “diputar” (*verdraaid*), melainkan kebenaran yang dicapai oleh hakim dalam batas-batas yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara.

Ini adalah akibat dari prinsip bahwa hal memegang teguh tata hukum perdata adalah terserah pada inisiatifnya orang-orang yang berkepentingan, terutama dalam lapangan hukum harta benda (*vermogensrecht*). Pihak yang berperkara dapat menentukan sikapnya menurut kehendaknya sendiri, misalnya dengan membiarkan verstek (tidak hadir dalam persidangan) atau tidak membantah apa yang dikemukakan oleh pihak lawannya, meskipun ia mengetahui bahwa hal yang diajukan oleh lawannya itu tidak benar.

Prof. Mr. Eggens berpendapat bahwa di dalam acara perdata halnya bukan kebenaran materiil, pun bukan kebenaran formil, melainkan kebenaran relatif, yaitu kebenaran saling hubungannya kedua pihak yang berperkara, sebagai yang akan berlaku di dalam proses dan yang akan berlaku oleh sebab proses situ, serta oleh putusan hakim, berdasar atas caranya kedua pihak yang berperkara melakukan hubungannya di dalam proses<sup>23</sup>.

### **3. Asas-asas yang Berkaitan dengan Hakim dalam Perkara Perdata**

#### **a. Asas *Social Justice***

Asas ini merupakan asas yang mengamanatkan hakim untuk menyelami atau mencari tahu secara mendalam mengenai kualitas nilai pembuktian dalam perkara perdata<sup>24</sup>. Asas ini didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

#### **b. Asas *Hakim Bersifat Menunggu***

Asas ini merupakan asas hukum acara pada umumnya, termasuk di dalamnya hukum acara perdata. Asas ini menghendaki bahwa inisiatif

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta, 2005) Hal. 7

untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hal ini berarti bahwa, apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini seperti sebuah pameo sederhana yang berbunyi, “Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*Wo kein Klager ist, ist kein Richter; nemo iudex sine actore*)”. Jadi, tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya: *iudex ne procedat ex officio* (Pasal 118 HIR, 142 Rbg)<sup>25</sup>.

### **c. Asas Hakim Pasif**

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Aktifnya hakim dapat dilihat saat memimpin persidangan, misalnya dengan adanya usaha dari hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak. Bentuk yang lain misalnya, tindakan hakim untuk memberi penerangan

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta, 2006) Hal. 10-11

selayaknya kepada para pihak yang berperkara tentang upaya-upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan, atau tentang pengajuan alat-alat bukti, sehingga dengan demikian pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Tetapi dalam perkara perdata, selain bersifat aktif, hakim bersifat pasif pula, dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara (*secundum allegata iudicare*) dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Maka dapatlah disimpulkan bahwa hakim bersifat aktif kalau ditinjau dari segi/sudut demi kelancaran persidangan, sedangkan hakim bersifat pasif kalau ditinjau dari segi luasnya tuntutan<sup>26</sup>. Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan (pasal 130 HIR, 154 Rbg).

Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang diatur. Apakah yang bersangkutan akan mengajukan banding atau tidak, itu pun bukan kepentingan dari hakim.

---

<sup>26</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta, 2008) Hal. 15-19



#### **d. Asas Mendengar Kedua Belah Pihak (*Audi et Alteram Partem*)**

Di dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak, dan didengar bersama-sama. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk member pendapatnya.<sup>27</sup> Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar ini lebih dikenal dengan asas "*audi et alteram partem*".

Perkataan "*audi et alteram partem*" ini berasal dari bahasa Latin yang artinya "dengarlah juga pihak lain", yang pengertiannya sama dengan "*eines mannes rede ist keines mannes rede*" atau "*man soll sie horen alle beide*", yaitu orang harus mendengar kedua belah pihak<sup>28</sup>.

#### **e. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan**

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* Hal. 14-15

<sup>28</sup> Achmad Ali, *Menang dalam Perkara Perdata* (Ujung Pandang, 1997) Hal.57

itulah, maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.<sup>29</sup>

Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk dilakukan kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan. Untuk lebih dapat mempertanggungjawaban putusan sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim terikat pada atau harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, atau yang telah pernah diputuskannya sendiri saja. Walaupun kita tidak menganut asas "*the binding force of precedent*", namun memang janggal kiranya kalau hakim memutuskan bertentangan dengan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya mengenai perkara yang sejenis, karena lalu menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Tetapi sebaliknya, hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ia harus berani pada suatu ketika meninggalkan yurisprudensi yang ada, kalau sekiranya sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan zaman atau keadaan masyarakat.

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* Hal. 15

#### **f. Asas *Ius Curia Novit***

Asas *ius curia novit* secara harfiah berarti hakim dianggap mengetahui hukum. Jadi maksudnya, hakim dianggap mengetahui semua hukum terhadap perkara apa saja yang diperiksanya.<sup>30</sup> Oleh karena itu, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (pasal 16 ayat 1 UU No.4 tahun 2004). Memang pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.

#### **g. Asas *Objektivitas***

Asas objektivitas atau tidak memihaknya pengadilan terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus objektif dan tidak boleh memihak. Untuk menjamin asas ini bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya, yang disebut hak ingkar.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Achmad Ali. *Op.cit.* Hal.71

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* Hal. 20-21

Hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda antara seorang hakim dan ketua, jaksa, penasehat hukum, atau panitera dalam suatu perkara tertentu atau hubungan sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili, merupakan alasan untuk menggunakan hak ingkar bagi seseorang yang diadili. Asas ini didasarkan atas suatu pertimbangan, bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo judex idoneus in propria causa*). Sebaliknya, berdasarkan alasan-alasan yang sama pula hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

#### **h. Asas Susunan Persidangan Majelis**

Di dalam susunan persidangannya, untuk semua pengadilan pada dasarnya sama yaitu merupakan majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang. Asas ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjek-objektifnya, guna memberi perlindungan hak-hak azasi manusia dalam bidang peradilan<sup>32</sup>.

### **B. Perceraian**

#### **1. Pengertian Perceraian**

Secara etimologis (bahasa) berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Perceraian” berasal dari kata dasar “Cera” yang berarti pisah; putus hubungan sebagai suami isteri. Lalu mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang menunjukkan sifatnya sebagai kata benda

---

<sup>32</sup> *Ibid.* Hal. 34

abstrak yang berarti perihal bercerai; perbuatan (hal dan sebagainya) menceraikan<sup>33</sup>. Sedangkan, kata bercerai artinya perpisahan, tidak bercampur lagi, dalam hal ini berarti berhenti berlaki-bini. Jadi dalam artian serupa, perceraian berarti perpisahan atau perihal bercerai antara laki bini<sup>34</sup>.

Menurut ahli fiqih, perceraian berasal dari istilah "*talaq*" atau "*fuurqaah*". Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqaah* berarti bercerai, akan tetapi kedua istilah tersebut tetap menyatu pada suatu hal yakni perceraian antara suami isteri<sup>35</sup>. Sedang berdasarkan Fiqh Islam *ta'rif Talaq* menurut bahasa Arab melepaskan ikatan. Yang dimaksud disini adalah melepaskan ikatan perkawinan<sup>36</sup>.

Sehingga dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah tindakan memisahkan diri untuk memutuskan hubungan antara satu dengan yang lainnya (antara suami dan isteri). Dapat pula diartikan sebagai terlepasnya atau terputusnya ikatan aqad nikah sebagai suami isteri. Dengan kata lain, apabila telah jatuh talak, maka hubungan antara suami isteri yang telah bertalak itu tidak boleh lagi terjadi sebagaimana layaknya sebelum talak.

---

<sup>33</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Op.cit.* Hal. 278

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandar Lampung, 2010) Hal. 92

<sup>35</sup> Emalisa Rauf, *Penerapan Hukum Pembuktian dalam Gugatan Perceraian dengan Alasan Zina di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2004) Hal. 6

<sup>36</sup> Karmilawati, *Peranan Alat-Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002) Hal. 5

Sedangkan secara terminologis atau berdasarkan istilah agama atau *syara'*, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan<sup>37</sup>. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan "cerai talak". Cerai talak ini selan diperuntukkan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, juga dapat dimanfaatkan oleh isteri jika suami melanggar perjanjian taklik talak<sup>38</sup>.

Beberapa pakar turut mengemukakan rumusan mengenai pengertian perceraian. Syadsafi Mustopha mengemukakan bahwa<sup>39</sup>:

"Apabila dalam pergaulan suami isteri setelah diusahakan sedemikian rupa ternyata tidak mencapai tujuan berumah tangga menimbulkan kebencian, percekcoan, permusuhan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa salah satu pihak maka dibuka suatu jalan keluar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan guna memberi kebebasan kepada masing-masing pihak untuk menentukan nasibnya sendiri-sendiri, yakni dengan suatu cara 'perceraian' walaupun hal tersebut adalah upaya terakhir."

---

<sup>37</sup> Rachmah, *Perbandingan Proses Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002) Hal. 6

<sup>38</sup> Rachmadi Usman. *Op.cit.* Hal. 400

<sup>39</sup> Karmilawati. *Op.cit*

Dengan kata lain, perceraian adalah salah satu solusi bagi perkawinan yang sudah tidak dapat lagi dirujukkan. Rumusan lainnya diutarakan oleh Prof. Subekti bahwa<sup>40</sup>:

“Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.”

Dari berbagai rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan perkawinan antara suami isteri yang secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.

## **2. Jenis-jenis Perceraian**

Secara umum, putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian terbagi atas dua, yaitu:

### **a. Cerai mati**

Cerai mati adalah putusnya ikatan perkawinan disebabkan oleh karena salah satu di antara suami isteri itu meninggal dunia (mati)<sup>41</sup>, sehingga ikatan perkawinan di antara mereka pun putus dengan sendirinya; dan

---

<sup>40</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta, 2003) Hal. 42

<sup>41</sup> Rachmah. *Op.cit.* Hal. 22

b. Cerai hidup

Cerai hidup adalah putusnya ikatan perkawinan dimana kedua belah pihak masih dalam keadaan hidup, yakni ketika salah satu pihak melakukan gugatan cerai atau talak terhadap pihak lainnya atau kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri atau memutus ikatan perkawinan di antara mereka. Dengan kata lain, cerai hidup ini dapat terjadi karena dua hal, yakni (i) cerai karena kemauan dari suami isteri atau atas kemauan dari salah satu dari keduanya; dan (ii) cerai karena putusan pengadilan<sup>42</sup>.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian yang tertuang dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 36 PP No.9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, secara tersirat dinyatakan bahwa ada dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

- a. Cerai talak, yaitu perceraian yang disebabkan karena keinginan atau inisiatif dari suami. Cerai talak ini khusus untuk yang beragama Islam, seperti dirumuskan dalam Pasal 14 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yakni bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada pengadilan yang ada di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Hal. 22



bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

- b. Cerai gugat, adalah perceraian yang disebabkan karena adanya gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu keputusan pengadilan. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya tidak menamakan hal ini “cerai gugat”, tetapi menyatakan perceraian dengan suatu gugatan.<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 20 menegaskan bahwa Gugatan perceraian dimaksudkan dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selama beragama Islam.

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan cerai gugat adalah cerai yang disebabkan keinginan atau inisiatif dari isteri bila perkawinannya dilakukan berdasarkan Hukum Islam, atau oleh salah satu pihak bila perkawinannya dilakukan berdasarkan kepercayaan atau agama lainnya.

---

<sup>43</sup> Emalisa Rauf. *Op.cit.* Hal. 9

Berdasarkan perspektif Hukum Islam, jenis-jenis talak atau perceraian dapat dibedakan atas<sup>44</sup>:

a. Apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk isterinya kembali, maka jenis-jenis talak itu meliputi:

1. *Talak raj'i*, yakni talak yang dijatuhkan suami, di mana suami berhak rujuk selama isteri masih dalam masa *iddah* tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak kesatu atau talak kedua;

2. *Talak ba'in*, terdiri atas:

i. *Talak ba'in shughraa* (kecil), yakni talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*, seperti talak yang terjadi sebelum adanya hubungan seksual (*qabila al dukhul*), talak dengan tebusan atau (*khuluk*) dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

ii. *Talak ba'in kubraa* (besar), yakni talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, seperti talak yang terjadi untuk ketiga kalinya dan talak sebab li'an.

b. Apabila ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka jenis-jenis talak itu meliputi:

---

<sup>44</sup> Rachmadi Usman. *Op.cit.* Hal. 401

1. *Talak sunni* (halal), yakni talak yang diperbolehkan yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut;
2. *Talak bid'i* (haram), yakni talak yang dilarang yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

### **3. Alasan Perceraian**

Dalam Pasal 209 *Burgelijk Wetboek* (BW), disebutkan bahwa alasan perceraian, yaitu: (a) zina (*overspel*); (b) meninggalkan tempat tinggal bersama itikad jahat (*kwaadwillige verlating*); (c) salah satu pihak dihukum lima tahun penjara atau lebih; atau (d) melukai berat atau menganiaya sehingga membahayakan jiwa atau mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai pengulangan bunyi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi mabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi cekcok dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebut alasan lainnya yang dapat dijadikan dasar bagi perceraian, yakni:

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Penyebutan alasan-alasan perceraian dalam pasal-pasal perundang-undangan dimaksud bersifat limitatif, maksudnya membatasi kemungkinan putusnya perkawinan dengan perceraian sehingga

perceraian tersebut tidak mudah untuk dilakukan mengingat hakikat utama perkawinan tersebut yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

#### **4. Tata Cara Pemeriksaan Perceraian**

Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam. Bagi yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, gugatan perceraian isteri diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain Islam, gugatan perceraian suami atau isteri diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, tata cara pemeriksaan cerai gugat telah dtentukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Sementara itu, tata cara pemeriksaan cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 132 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pada ketentuan yang disebutkan sebelumnya, maka tata cara pemeriksaan cerai gugat sebagai berikut<sup>45</sup>:

**a. Pengajuan Gugatan**

Gugatan perceraian diajukan oleh suami isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tergugat tempat kediamannya tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraianya diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Begitu juga dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat, dan selanjutnya Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Seandainya apabila gugatan perceraian tersebut dilakukan didasarkan pada alasan *Onheerbare Tweespalt*, maka diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan perceraian yang demikian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Khusus bagi Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri

---

<sup>45</sup> *Ibid.* Hal.404-409

tersebut dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

#### ***b. Pemanggilan***

Setiap kali diadakan sidang pemeriksaan, pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian tersebut, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka dipanggil untuk menghadiri sidang yang dilakukan oleh juru sita atau petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Panggilan dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atas kuasa mereka selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka, yang disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatannya. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dalam persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Dalam hal yang demikian sudah dilakukan dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa kehadiran tergugat, kecuali apabila dalam gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Walaupun demikian tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan perceraian tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan. Seandainya tergugat berada, bertempat kediaman di luar negeri maka panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

### ***c. Pemeriksaan***

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan. Penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian sebagai usaha mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian, karena makin cepat perkara itu diselesaikan oleh pengadilan semakin baik, bukan saja bagi suami isteri itu, melainkan bagi keluarga dan apabila mereka mempunyai anak terutama bagi anak-anaknya.

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, pihak yang berperkara yaitu suami isteri dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, yang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Pemeriksaan gugatan perceraian dengan sidang tertutup dikarenakan menyangkut rahasia sebuah keluarga.

### ***d. Perdamaian***

Prinsip perdamaian dalam menyelesaikan pemeriksaan perkara perkawinan lebih diutamakan. Sebelum dan selama gugatan perceraian diputuskan oleh pengadilan, usaha mendamaikan kedua pihak selalu dilakukan oleh hakim. Usaha ini tidak terbatas pada sidang pertama



sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu. Pasal 130 HIR/154 RBG menetapkan bahwa jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, maka oleh hakim dibuatkan suatu akta perdamaian yang mana suami isteri diwajibkan untuk melaksanakan isi perdamaian itu, yang berkekuatan hukum dan harus dijalankan sama seperti putusan biasa dan tidak dapat dimohonkan banding. Jadi, akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dan suami isteri wajib melaksanakan isinya, sebab dalam akta perdamaian tersebut hakim telah memuat apa-apa yang menjadi kehendak dan keinginan para pihak yang berperkara, dalam rangka mengakhiri gugatan perceraian tersebut.

Apabila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian tersebut. Bagi suami isteri yang beragama Islam, biasanya Pengadilan Agama meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian setempat.

#### ***e. Pisah Rumah dan Kewajiban Nafkah***

Sebelum putusan dijatuhkan, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan

pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, demi kebaikan suami isteri beserta anak-anaknya, pengadilan dapat mengizinkan suami isteri untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Demikian pula proses perceraian yang sedang terjadi antara suami isteri, tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya dan anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan suami atau isteri menjadi telantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami isteri, melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

Oleh karena itu, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat:

- a.) Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami;
- b.) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

#### ***f. Putusan Pengadilan***

Walaupun pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, namun putusan mengenai gugatan perceraian harus diucapkan dalam sidang terbuka, kalau tidak diancam dengan kebatalan demi hukum, yaitu putusan yang tidak (akan) mempunyai kekuatan hukum dan sah sebagai suatu putusan yang dapat dijalankan. Atas putusan pengadilan ini, dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara,

kecuali apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Dalam putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **C. Cekcok Terus-Menerus yang Tidak Dapat Didamaikan Lagi (*Onheelbare Tweespalt*)**

#### **1. Pengertian Cekcok Terus-Menerus yang Tidak Dapat Didamaikan Lagi (*Onheelbare Tweespalt*)**

Secara etimologis, kata “cekcok” berarti bertengkar; berbantah; berselisih; ribut<sup>46</sup>. Konteks cekcok tersebut sering disamaartikan dengan kata perselisihan yang berasal dari kata dasar “selisih” dan mendapat imbuhan per-an berarti hal yang berbeda; berlainan; atau tidak sependapat<sup>47</sup>. Dalam kehidupan berumah tangga, perselisihan atau

---

<sup>46</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Op. Cit.* Hal. 269

<sup>47</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Op.Cit.* Hal. 1296

cekcok merupakan hal yang lazim terjadi. Perihal penyebab terjadinya perceraian, perselisihan yang terjadi tersebut haruslah memenuhi syarat yakni berlangsung secara terus-menerus, dalam artian bahwa perselisihan atau cekcok tersebut terjadi secara berkelanjutan; tidak berkeputusan; tiada hentinya; bersinambung<sup>48</sup> sehingga mempengaruhi kerukunan kehidupan berumah tangga dalam kurun waktu yang tak terputus atau tidak ada waktu jeda untuk berdamai dalam perselisihan tersebut. Sedangkan konteks “tidak dapat didamaikan lagi” bermakna suatu keadaan dimana cekcok atau perselisihan yang terjadi secara terus-menerus tersebut tidak mungkin lagi untuk rukun atau berbaikan kembali, sehingga tidak lagi terdapat ketentraman atau ketenangan di dalamnya<sup>49</sup>. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi adalah pertengkaran atau perselisihan yang terjadi secara intens dan berkelanjutan yang tidak bisa menjadi rukun kembali.

Cekcok terus-menerus yang ada dalam bahasa hukum yang dikonkordansikan dari Belanda dinamakan *Onheelpbare tweespalt*, yang secara harfiah, “*tweespalt*” berarti perselisihan, sedangkan “*heel*” bisa berarti rukun atau damai<sup>50</sup>, yang terdapat dalam kata “*onheelpbare*” yang mengandung makna tidak akan bisa didamaikan. Sehingga secara

---

<sup>48</sup> Artian kata “terus-menerus” Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Op. Cit.* Hal. 1513

<sup>49</sup> Artian kata “damai”, Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Op. Cit.* Hal. 312

<sup>50</sup> Tim Hukum Online, “*Onheelpbare Tweespalt* dalam Doktrin dan Yurisprudensi” (April, 2012) <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7ab5bef40e2/ionheelpbare-tweespalt-i-dalam-doktrin-dan-yurisprudensi> (Diakses pada 21 November 2013 Pkl. 19.30 WITA)

keseluruhan memiliki makna perselisihan yang tidak akan bisa didamaikan.

Cekcok suami isteri sebagai dasar mengajukan cerai bukan hanya dikenal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), melainkan juga secara tersirat dimuat dalam hukum adat, yakni bahwa perceraian bisa timbul karena terjadi penganiayaan oleh suami terhadap isteri, pencederaan yang tak putus-putus dan tak mungkin diperbaiki lagi, cacat badan dan penyakit yang tak kunjung sembuh, serta rasa benci antara suami dan isteri.

Dalam kenyataannya, ada atau tidaknya *Onheelbare Tweespalt* adalah mengenai penilaian hasil pembuktian<sup>51</sup>. Cekcok yang terjadi tidak dapat langsung dianggap sebagai suatu keretakan yang tak dapat dipulihkan karena bahwa suami isteri sekali-kali cekcok adalah hal umum<sup>52</sup>. Yang diartikan dengan *onheelbare tweespalt*, bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami-isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak

---

<sup>51</sup> R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 4: tentang Pembuktian* (Jakarta, 2010) Hal. 4

<sup>52</sup> *Ibid.* Hal. 8

adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri.<sup>53</sup>

## **2. Perbandingan Cekcok Terus-Menerus yang Tidak Dapat Didamaikan Lagi (*Onheelbare Tweespalt*) dengan *Syiqaq* dalam Hukum Islam**

Cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*Onheelbare Tweespalt*) merupakan salah satu alasan perceraian yang termuat dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang terjadi antara suami dan isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan hukum positif yang berlaku secara nasional bagi seluruh warga negara Indonesia yang merupakan unifikasi dari kemajemukan (pluralisme) hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Proses unifikasi hukum bukanlah hal yang mudah dilakukan, terutama dalam bidang hukum keluarga karena menyangkut hal-hal yang bersifat keagamaan, adat, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Salah satu bagian dari proses unifikasi yang dilakukan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah menetapkan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Alasan perceraian yang diatur dalam frasa

---

<sup>53</sup> Soedharyo Soimin, *Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata* (Jakarta, 1996) Hal. 262

penjelasan pasal tersebut merupakan bagian dari upaya unifikasi yang dilakukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam hukum perdata barat (*western legal system*), seperti di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belanda, Rusia, Australia dan Swedia, disebut dengan *irreconcilable differences* atau *irretrievable breakdown* yang merupakan bagian dari kategori *no-fault divorce*. Alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam kedua sistem hukum tersebut membawa dampak yang berbeda atas penerapannya di masyarakat<sup>54</sup>.

Dalam sistem hukum keluarga di negara-negara barat (*western world*) terdapat perkembangan dengan diadopsinya alasan perceraian atas dasar tanpa kesalahan (*no-fault divorce*). Revolusi gagasan *no-fault divorce* ini diawali di Amerika Serikat, tepatnya dimulai dari negara bagian California pada tahun 1970. Sejak saat itu, perkembangan konsep ini merambah hingga ke negara-negara lain, seperti Belanda mengadopsinya pada tahun 1971, Swedia pada tahun 1973, Perancis pada tahun 1975 hingga ke Benua Australia pada tahun 1974.

Diadopsinya gagasan *no-fault divorce* dalam sistem hukum di negara-negara barat adalah didasarkan atas alasan adanya *irreconcilable differences* atau *irretrievable breakdown*, yang dapat diterjemahkan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tanpa harapan untuk hidup rukun kembali. Oleh karena itu, alasan *irreconcilable differences* atau *irretrievable breakdown* yang diadopsi dalam sistem

---

<sup>54</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Op.cit.* Hal. 10-15

hukum keluarga di negara-negara barat kurang lebih sama dengan alasan perceraian yang diadopsi dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan.

Dalam konteks diterapkannya alasan perceraian karena adanya *irreconcilable differences* atau *irretrievable breakdown* di negara-negara barat terdapat hubungan dengan adanya peningkatan angka perceraian di negara-negara tersebut. Meskipun diadopsinya alasan perceraian tersebut bukan menjadi faktor penentu meningkatnya angka perceraian, namun diadopsinya alasan tersebut ikut mempengaruhi tingginya angka perceraian. Adanya dasar *no-fault divorce* mempermudah warga negara di negara-negara barat untuk mengajukan gugatan cerai.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) alasan perceraian diatur secara tegas dalam Pasal 209. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara suami-isteri tidak menjadi alasan perceraian menurut *Burgerlijk Wetboek*. Diadopsinya alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-istri dimuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan dan juga pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan memiliki dampak yang berbeda-beda bagi warga negara Indonesia. Meskipun demikian, belum ada pengaturan secara rinci mengenai ukuran yang menjadi pedoman dalam menentukan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-



menerus dalam lingkup Peradilan Umum maupun tata cara atau prosedur pengajuan gugatannya.

Pengaturan mengenai perselisihan terus-menerus sebagai alasan perceraian juga diatur menurut hukum Islam di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pengaturannya dimuat dalam Pasal 116. Selain itu, alasan perceraian ini sekalipun tidak sepenuhnya sama, namun juga cenderung diidentikkan dengan *syiqaq* dalam hukum Islam yang secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti terus-menerus. *Syiqaq* dalam hukum Islam diatur dalam Al Qur'an surat Annisa ayat 35:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan (*syiqaq*) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dalam rangka penegakan hukum Islam, Indonesia membentuk lembaga Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Peradilan Agama) yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata Islam bagi umat Islam Indonesia.

Dalam bagian yang mengatur tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan, Pasal 76 ayat Undang-Undang Peradilan Agama dengan

jelas menegaskan bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Arti *syiqaq* adalah keretakan yang telah sangat hebat antara suami isteri. Semata-mata karena *syiqaq* tidak diperkenankan langsung bercerai. Peristiwa *syiqaq* antara suami isteri mesti diadakan usaha perdamaian walaupun telah mencampurtangankan pihak ketiga yang sedapat-dapatnya berasal dari keluarga sendiri. Sungguhpun demikian, Hakim Pengadilan Agama dapat pula mengangkat dua hakim yang bukan berasal dari keluarga keduanya melihat kemaslahatannya.<sup>55</sup>

Hakam merupakan orang yang diajukan oleh pihak isteri dan pihak suami. Kedua hakim ini disebut Hakamain. Hakim dari masing-masing pihak berusaha mencari *ishlah* atau perbaikan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang menunjuknya. Kemudian mencari kesepakatan pendapat antara keduanya. Jadi dengan demikian, kedua Hakim itu dapat kita perbandingkan sebagai arbiter atau pengantara dalam mencari perbaikan. Menunjuk dua hakim untuk penyelesaian *syiqaq* ini adalah wajib hukumnya. Kewajiban itu diletakkan pada suami isteri tersebut dan

---

<sup>55</sup> Sayuti Thalib. *Op.Cit.* Hal. 95

keluarga kedua belah pihak. Kewajiban itu juga dibebankan kepada Hakim<sup>56</sup>.

Istilah *syiqaq* dalam menurut Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Pengertian kata *syiqaq*, menurut Undang-Undang Peradilan Agama, masih sering dijumpai beberapa permasalahan dalam penerapannya terutama dalam hal menetapkan ukuran kapan terjadinya *syiqaq*. Ada pendapat yang mengatakan *syiqaq* bisa disebabkan oleh *nusyuz* (perbuatan durhaka) dari istri, atau karena perilaku zalim atau kasar dari suami. Jika *syiqaq* disebabkan oleh *nusyuz*, maka hendaknya suami mengatasinya dengan cara yang paling ringan di antara cara-cara yang telah diatur oleh Allah SWT dalam Al Qur'an (QS. Annisa: 34). Tetapi jika hal kedua yang terjadi dan dikhawatirkan suami akan terus-menerus berlaku zalim atau sulit kedua suami istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam (juru damai) yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Ada pendapat lain yang mengatakan *syiqaq* terjadi bila perselisihan atau pertengkaran antara suami-istri mengandung unsur membahayakan suami istri dan terjadi pecahnya perkawinan. Bila perselisihan tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan belum sampai pada tingkat darurat, maka hal tersebut belum dikatakan *syiqaq*. Namun pendapat ini tidak menyertakan

---

<sup>56</sup> *Ibid.* Hal. 96

unsur-unsur yang membahayakan dan tingkat darurat yang dimaksud serta tidak ada aturan untuk mengukur unsur-unsur tersebut.

Dalam hal *syiqaq* di Indonesia, aturan-aturan hukum Islam telah memperinci tata cara dan mekanisme penegakannya, baik itu dalam Undang-Undang Peradilan Agama hingga Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta prosedur penegakannya dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Perbandingan hukum ini menjadi dasar pertimbangan apakah adopsi alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri tepat diterapkan di tengah masyarakat Indonesia. Perbandingan penerapan ini juga menjadi bahan pembandingan hukum sebagai sarana pembaharuan nilai-nilai di masyarakat (*tool of social engineering*).

#### **D. Wewenang / Kompetensi Peradilan Agama**

Menurut M. Yahya Harahap, ada lima tugas dan kewenangan yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama, yaitu: (1) Fungsi kewenangan mengadili; (2) Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah; (3) Kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang; (4) Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama

mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif; serta (5) bertugas mengawasi jalannya peradilan<sup>57</sup>.

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Peradilan Agama). Wewenang tersebut terdiri dari wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989, yaitu bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syaria'ah.

## **1. Kompetensi Relatif Peradilan Agama**

Untuk menentukan kompetensi relative setiap Pengadilan Agama, dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang

---

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU No. 7 tahun 1989 (Jakarta, 1993) Hal. 133

Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66 dan pasal 73 Undang-Undang Peradilan Agama. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor sequitor forum rei*". Namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), yaitu<sup>58</sup>:

- Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yng daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat;
- Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat;
- Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak; dan

---

<sup>58</sup> Sulaikin Lubis, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta, 2008) Hal. 108

- Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Tentang kompetensi relatif perkara permohonan perceraian, menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa kompetensi relatif dalam bentuk cerai talak, pada prinsipnya ditentukan oleh faktor tempat kediaman termohon. Hal ini dikecualikan dalam hal termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa izin pemohon. Demikian pula apabila termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka kompetensi relatif jatuh kepada Peradilan Agama di daerah hukum tempat kediaman pemohon.

Dalam hal cerai gugat, kompetensi relatif ditentukan faktor tempat kediaman penggugat, sebagaimana tercantum dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama. Namun hal ini pun dikecualikan bila penggugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, maka kompetensi relatif beralih pada tempat kediaman tergugat (suami). Selain itu, dalam pasal 73 ayat (2) ditentukan bahwa kompetensi relatif berada pada tempat kediaman tergugat apabila penggugat berkediaman di luar negeri. Di samping itu, ditentukan pula pada pasal 73 ayat (3) dalam hal suami isteri berkediaman di luar negeri, yaitu kompetensi relatif ditentukan tempat perkawinan dilangsungkan atau dapat pula diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

## 2. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Sebelum perubahan, Undang-Undang Peradilan Agama menetapkan bahwa tugas kewenangan Peradilan Agama, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang<sup>59</sup>: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan (c) wakaf dan sedekah. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tersebut, sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang beragama Islam.<sup>60</sup>

Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah; dan (i) ekonomi syari'ah.

---

<sup>59</sup> Bab I Pasal 2 jo. Bab III Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>60</sup> Yang dimaksud dengan "antara mereka yang beragama Islam, adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama. Hal ini dimuat dalam Penjelasan Pasal 1 angka 37 tentang perubahan pasal 49 UU No.7 Tahun 1989. Sulaikin Lubis. *Op. Cit.* Hal. 109



## **b. Kewenangan Mengadili Perkara Bidang Perkawinan**

Mengenai bidang perkawinan, pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, Pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu:

- 1) Izin beristeri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam halo rang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mamapu memenuhinya;

- 13) Penentuan kewajiban member biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal usul anak;
- 21) Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain.

### **c. Kewenangan Mengadili Perkara Bidang Kewarisan, Wasiat, dan Hibah**

Mengenai jangkauan kewenangan mengadili sengketa kewarisan ditinjau dari sudut hukum waris Islam, dapat dilakukan melalui pendekatan Pasal 49 ayat (3) jo. Penjelasan umum angka 2 alinea keenam Undang-Undang Peradilan Agama, yang memuat bahwa pokok-pokok hukum waris Islam yang akan diterapkan pada golongan orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama terdiri atas:

- 1) Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, meliputi penentuan kelompok ahli waris, siapa yang berhak mawaris, siapa yang terhalang menjadi ahli waris, dan penentuan hak dan kewajiban ahli waris;
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan, antara lain tentang penentuan tirkah yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan;
- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Pada dasarnya, penerapan hukum Islam dalam peradilan agama merupakan hal yang mutlak, sehingga ketentuan yang digunakan pun merupakan hukum kewarisan Islam. Demikian pula halnya dengan masalah wasiat dan hibah, seyogyanya juga menggunakan hukum Islam. Jadi, dalam hal ada perselisihan dan persengketaan antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang wasiat dan hibah ini, pihak-pihak yang berkepentingan atau yang berhak dapat mengajukan perkara kepada pengadilan agama sesuai dengan wewenangnya.<sup>61</sup>

#### **d. Kewenangan Mengadili Perkara Bidang Wakaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqah**

Pengaturan wakaf ditinjau dari pelebagaan agama Islam terdapat dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi hukum positif dengan pengaturan yang cakupannya lengkap. Demikian halnya dengan zakat, infaq, dan shadaqah yang diatur menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam, yang berlaku dengan berdasar pada hukum Islam di dalamnya.

#### **e. Kewenangan Mengadili Bidang Ekonomi Syari'ah**

Ekonomi syari'ah pada dasarnya merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah<sup>62</sup>, meliputi:

- 1) Bank syari'ah;
- 2) Asuransi syar'ah;
- 3) Reasuransi syari'ah;
- 4) Reksa dana syari'ah;
- 5) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;

---

<sup>61</sup> *Ibid.* Hal. 115-116

<sup>62</sup> Penjelasan pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- 6) Sekuritas syari'ah;
- 7) Pembiayaan syari'ah;
- 8) Pegadaian syari'ah;
- 9) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
- 10) Bisnis syari'ah; dan
- 11) Lembaga keuangan mikro syari'ah.

Dalam hal ini terdapat perluasan terhadap pengertian “orang-orang” yang meliputi juga lembaga ekonomi yang berupa bank ataupun perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum yang tunduk pada ketentuan hukum Islam, sehingga menjadi bagian dari wewenang absolut Peradilan Agama.

#### **f. Mengenai Wewenang Pengadilan Agama yang lain**

Dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama juga diberi tugas dan kewenangan lain, yaitu dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam itu, tidak dibenarkan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di pengadilan. Berdasarkan ketentuan baru dalam UU No. 3 tahun 2006, Pengadilan Agama juga berwenang memberikan *istbat* kesaksian *rukyyat hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah, yang diatur dalam Pasal 52A.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar, kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut dipilih guna memenuhi berbagai data dan informasi yang sesuai dan dibutuhkan untuk menyelesaikan pembahasan karya tulis ini, dengan didukung pertimbangan dapat mempermudah proses penelitian yang dilakukan karena sesuai dengan tempat domisili peneliti.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari dua sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Makassar, termasuk informasi yang diperoleh dari para Hakim yang sehubungan dengan penelitian ini; dan
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data-data atau berkas yang telah dikelola sebelumnya dalam arsip atau pun dokumen.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
2. Penelitian pustaka (*literature research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, putusan pengadilan, koran dan karya ilmiah terkait dengan objek penelitian

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian,
2. Analisis Dokumen (*content analysis*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji,
3. Daftar pertanyaan (kuisisioner), yaitu dengan memberikan rangkaian pertanyaan (kuisisioner), yaitu dengan memberikan rangkaian pertanyaan tentang hal yang berkenaan dengan penelitian penulis dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan ini disampaikan dalam bentuk lisan dan/atau tertulis.

#### **D. Analisis Data**

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Analisis kualitatif merupakan proses analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, termasuk dalam hal penguraian data kuantitatif yang diperoleh untuk menggambarkan keadaan atau hasil penelitian tersebut, yang selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Cekcok Terus-Menerus yang Tidak Dapat Didamaikan Lagi (*Onheerbare Tweespalt*) sebagai Alasan Perceraian**

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan sejahtera atau juga disebut sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataannya seiring dengan proses dan berbagai dinamika kehidupan berumah tangga yang dijalani, ikatan perkawinan tersebut kadang kala tidak mampu dipertahankan lagi, hingga akhirnya berujung pada putusnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri dalam keluarga tersebut.

Perihal putusnya ikatan perkawinan, telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana pula tertera dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan tersebut bermakna putusnya ikatan lahir batin yang terbentuk antara suami dan isteri dalam ikatan perkawinan atau keluarga yang telah dijalin sebelumnya. Putusnya perkawinan tersebut

juga akan berimplikasi pada berubahnya pemenuhan hak dan kewajiban setelah suami dan isteri tidak lagi terikat dalam ikatan perkawinan.

Jika diamati lebih mendalam sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan, perceraian (*echtscheiding*) memiliki sifat yang cenderung berbeda dengan sebab-sebab putusnya perkawinan yang lain (karena kematian dan atas putusan pengadilan). Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian (cerai hidup) menunjukkan kesan adanya hal-hal tertentu, termasuk ketidaksesuaian lagi antara suami isteri dan/atau perselisihan yang menyebabkan ikatan perkawinan di antara mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan kata lain, penyebab putusnya perkawinan karena perceraian disebabkan oleh perilaku salah satu atau kedua belah pihak (suami dan isteri) yang menyebabkan tidak tercapainya pelaksanaan kewajiban serta pemenuhan hak sebagaimana mestinya di dalam keluarga, yang pada akhirnya menyebabkan suami dan/atau isteri dalam keluarga tersebut ingin mengakhiri ikatan perkawinan di antara mereka.

Sedangkan putusnya perkawinan karena kematian (cerai mati) tidak menunjukkan adanya kesan perilaku aktif dari suami dan/atau isteri yang menyebabkan timbulnya keinginan mengakhiri ikatan perkawinan di antara mereka. Penyebab putusnya perkawinan ini merupakan hal yang mutlak terjadi karena salah satu pihak telah meninggal dunia sehingga ikatan perkawinan di antara mereka secara mutatis mutandis hilang dengan sendirinya.

Lain halnya lagi dengan putusnya perkawinan oleh putusan pengadilan. Penyebab ini dapat dikatakan merupakan pengkhususan dari penyebab putusnya perkawinan karena perceraian, yang lebih menekankan pada putusnya ikatan perkawinan karena “penetapan” di muka pengadilan yang sekaligus melegitimasi atau mengesahkan perceraian tersebut terjadi. Hal ini berbeda dengan perceraian secara pokok yang merupakan putusnya ikatan secara lahiriah maupun batiniah (psikis) antara suami dan isteri yang prosesnya berawal bahkan sebelum perceraian tersebut disahkan setelah menempuh jalur litigasi di pengadilan. Perceraian dengan ucapan ikrar talak yang dalam hukum Islam cukup untuk menjadi media diwujudkannya perceraian, belumlah diakui apabila belum dilakukan di muka persidangan. Perceraian barulah diakui secara hukum apabila telah memperoleh kekuatan hukum dari penetapan hakim di pengadilan bersangkutan.

Dengan kata lain, putusan pengadilan tersebut merupakan syarat formal dikabulkannya perceraian. Hal ini pun ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang serupa dengan muatan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Artinya, perceraian tidak boleh hanya semena-mena dilakukan oleh pihak suami dan/atau isteri begitu saja, melainkan juga harus berdasarkan

hukum yang berlaku sebagai bentuk pengakuan yang nyata akan terjadinya perceraian tersebut.

Pengaturan ini pun menjadi lugas dalam pasal 18 PP No. 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Sehingga jelaslah bahwa muara mekanisme perceraian terletak pada proses pemeriksaan dan penetapan hakim pengadilan bersangkutan untuk memutus perceraian yang terjadi.

Persoalan putusnya perkawinan atau perceraian serta akibat-akibatnya, diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, dimana tata caranya diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan teknisnya diatur lebih jauh dalam Peraturan Menteri Agama (PAM) No. 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam. Selain rumusan dalam perundang-undangan tersebut, perihal perceraian termasuk sebab-sebab terjadinya, tata cara, dan akibat hukumnya juga diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam.

Berbagai pengaturan tentang perkawinan di Indonesia, khususnya menyangkut perceraian pada umumnya menganut salah satu prinsip utama, yakni prinsip mempersulit perceraian. Prinsip ini secara tersirat

ditunjukkan pada ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan serta harus berdasarkan alasan-alasan yang sah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Prinsip mempersulit atau mempersukar perceraian ini pada hakikatnya mengacu pada tujuan luhur dari perkawinan itu sendiri, yakni untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, sebagaimana pula dalam hukum Islam yang mengamanatkan perceraian sebagai sesuatu perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah SWT.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perceraian adalah jalan atau alternatif terakhir yang dapat dilalui oleh suami isteri bila ikatan perkawinan atau rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhan atau kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksudkan bahwa sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam*<sup>63</sup> (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits<sup>64</sup>, serta melalui proses mediasi sebagai langkah awal dalam persidangan yang wajib dilalui untuk mencari titik damai antara kedua belah pihak dalam perkawinan.

Meskipun demikian, fakta empiris yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa tingkat terjadinya perceraian di Indonesia tergolong

---

<sup>63</sup> *Hakam* merupakan juru damai (arbitrator) untuk menyelesaikan perkara perselisihan terus-menerus (*syiqaq*) dalam pengaturannya sesuai hukum Islam. Sedangkan untuk hukum nasional Indonesia, ditempuh jalur mediasi pada tahapan awal persidangan, yang menggunakan mediator yang biasanya berasal dari hakim pengadilan tempat berperkara untuk mendamaikan perceraian antara pihak suami dan isteri.

<sup>64</sup> Zainuddin Ali. *Op.cit.* Hal. 73

cukup besar. Fakta tersebut ditunjukkan dalam data yang diterbitkan oleh Peradilan Agama di Indonesia pada tahun 2010 berikut:

**Tabel 1: Jumlah Perkara Masuk pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama di Indonesia Tahun 2010<sup>65</sup>**

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1.	Cerai Talak	94.099
	Cerai Gugat	190.280
2.	Perkara Lainnya	29.975
<b>T o t a l</b>		<b>314.354</b>

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari total 314.354 perkara yang masuk pada Peradilan Agama tingkat pertama di Indonesia tahun 2010, jumlah perkara bidang perceraian yang merupakan akumulasi jumlah cerai talak dan cerai gugat mencapai 284.379, yang jika dikalkulasikan berarti bahwa 90,5% dari total perkara yang masuk tersebut merupakan perkara perceraian dan hanya menyisakan 9,5% untuk perkara lainnya yang jenisnya bermacam-macam meskipun tidak diuraikan merinci dalam tabel di atas. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan berperkara pada Peradilan Agama Tingkat Pertama pada tahun 2010 adalah menyangkut perkara perceraian, berbanding jauh daripada perkara lainnya. Perceraian

---

<sup>65</sup> Diolah dari Damanhuri Zuhri , *Loc.Cit.*

seolah menjadi hal yang lazim dan banyak dilakukan di tengah masyarakat. Fakta ini juga sekaligus menyiratkan bahwa nilai-nilai perkawinan yang kekal dan sejahtera belumlah tercapai, sehingga banyak suami dan/atau isteri yang memilih untuk menyelesaikan ikatan perkawinan mereka di hadapan pengadilan. Tidak hanya itu, perceraian yang seyogianya menjadi hal yang sulit untuk dilakukan, kini menjadi alternatif yang lebih mudah untuk diputuskan apabila ikatan perkawinan yang terjalin dianggap tidak membahagiakan lagi.

Fakta lainnya yang ditunjukkan dalam tabel tersebut yakni bahwa dari perkara permohonan perceraian yang masuk, cerai gugat mendominasi dengan presentasi 66,9 % berbanding 33,1% daripada jumlah cerai talak atau dengan perbandingan sederhana 1:2. Data tersebut menunjukkan bahwa permohonan perceraian saat ini didominasi diajukan oleh perempuan, yang menyiratkan kecenderungan lebih mudah merasakan ketidakcocokan lagi dalam ikatan perkawinan, entah karena menyangkut pemenuhan hak atau kewajibannya dalam rumah tangganya.

Dalam lingkup yang lebih kecil, fenomena serupa juga terjadi dalam wilayah kota Makassar yang menjadi wewenang/kompetensi Pengadilan Agama Makassar, seperti ditunjukkan melalui data mengenai perkara perkawinan yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2012 dan tahun 2013 berikut:

**Tabel 2: Jumlah Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama  
Makassar Tahun 2012 dan 2013<sup>66</sup>**

No.	Jenis Perkara	Tahun	
		2012	2013
1	Izin Poligami	2	2
2	Pencegahan Perkawinan	0	0
3	Penolakan Perk. Oleh PPN	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	3	1
5	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Isteri	0	0
6	Cerai Talak	423	406
7	Cerai Gugat	1012	1077
8	Harta Bersama	5	13
9	Penguasaan Anak	0	0
10	Nafkah Anak oleh Ibu	5	5
11	Hak-hak Bekas Isteri	0	0
12	Pengesahan Anak	0	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0
14	Perwalian	0	23
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0
16	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	16	0

<sup>66</sup> Diolah dari data terbitan Pengadilan Agama Makassar, "Laporan yang Diputus pada Pengadilan Agama Makassar Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012 Bagian Perkawinan" dan "Laporan yang Diputus pada Pengadilan Agama Makassar Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2013 Bagian Perkawinan" (Diperoleh pada 7 Januari 2014)



No.	Jenis Perkara	Tahun	
		2012	2013
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0
18	Asal Usul Anak	0	0
19	Pengangkatan Anak	9	10
20	Pen. Kawin Campuran	0	0
21	Isbath Nikah	27	58
22	Izin Kawin	0	0
23	Dispensasi Kawin	7	8
24	Wali Adhol	4	7
25	Ekonomi Syari'ah	1	0
26	Kewarisan	10	13
27	Wasiat	0	0
28	Hibah	1	2
29	Wakaf	1	0
30	Zakat/Infaq/Shodaqah	0	0
31	P3HP/Penetapan Ahli Waris	63	92
32	Lain-lain	1	2
<b>Total</b>		1590	1719

Dari data yang tertera pada tabel 2 mengenai jumlah permohonan perkara perkawinan yang diputus pada Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2012 dan tahun 2013 di atas, dapat dilihat dengan jelas

bahwa jenis perkara permohonan perceraian yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat, sangat mendominasi dibandingkan dengan jenis perkara perkawinan yang lain. Cerai talak pada tahun 2012 mencapai jumlah 423 perkara, yang jika dikalkulasikan mencapai 26,6% dari total perkara yang masuk pada tahun tersebut. Jumlah ini sedikit menurun pada tahun 2013, yakni dengan jumlah 406 perkara yang berarti 23,6% dari total perkara masuk pada tahun 2013 tersebut.

Sedangkan cerai gugat pada tahun 2012 mencapai jumlah 1012 perkara atau 63,7% dari total perkara perkawinan pada tahun 2012. Akan tetapi, berbeda halnya dengan cerai talak yang menurun tahun berikutnya, cerai gugat justru mengalami peningkatan pada periode tahun 2013, yakni dengan jumlah 1077 perkara, meskipun presentasi totalnya menurun menjadi sebesar 62,7% dari total perkara perkawinan yang diputus pada tahun 2013 tersebut.

Dari uraian data tersebut, dapat dilihat bahwa perkara perceraian merupakan perkara yang paling banyak diajukan dalam Pengadilan Agama Makassar dengan jumlah yang sangat mencolok jauh dibandingkan perkara perkawinan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan berperkara di Pengadilan Agama Makassar lebih banyak didorong karena keinginan untuk memutus ikatan perkawinan dalam rumah tangga (perceraian). Data tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat perceraian yang terjadi pada masyarakat yang menjadi lingkup wewenang Pengadilan Agama Makassar masih sangat tinggi. Hal ini

secara tersirat mencerminkan kurang tercapainya tujuan perkawinan yang bersifat kekal dan sejahtera sebagaimana maksud awal dijalinnya ikatan perkawinan tersebut. Seperti halnya dalam gambaran umum di Indonesia yang telah dipaparkan sebelumnya, perceraian dalam lingkup wewenang Pengadilan Agama Makassar juga seakan menjadi hal yang lazim untuk dilakukan di tengah masyarakat. Hal ini jelas bertolak belakang dengan prinsip mempersulit perceraian yang merupakan salah satu prinsip utama regulasi perkawinan di Indonesia.

Tidak hanya itu, dari tahun 2012 hingga tahun 2013 terdapat kestabilan perbandingan jumlah antara cerai gugat dan cerai talak, dimana jumlah perkara cerai gugat jauh melebihi jumlah perkara cerai talak, yakni dengan kisaran perbandingan perbandingan 2,5 : 1. Perbandingan tersebut semakin menegaskan bahwa perempuan lebih mudah merasakan ketidakcocokan dan ketidaksesuaian lagi dalam ikatan perkawinan, sehingga lebih dominan dalam mengajukan permohonan perceraian di muka pengadilan.

Fenomena tingginya angka perceraian di Indonesia, khususnya di kota Makassar saat ini mengisyaratkan kurang tercapainya cita-cita luhur dan ideal dari pembentukan jalinan perkawinan atau rumah tangga. Oleh karena itu, selain penegasan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui penetapan di hadapan sidang pengadilan yang terlebih dahulu melalui tahap pendamaian atau mediasi kedua belah pihak (suami dan istri), prinsip mempersulit perceraian dalam regulasi tentang perkawinan di

Indonesia juga diejawantahkan melalui persyaratan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa ikatan perkawinan antara suami isteri benar-benar sudah tidak dapat diteruskan lagi, sehingga layak untuk diputuskan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Perihal alasan perceraian, dalam hukum Indonesia sebagaimana dikondansikan dari hukum perdata barat, ditunjukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 209, yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah dan hanyalah sebagai berikut<sup>67</sup>:

1. Zina;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat;
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan;
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian, sehingga

---

<sup>67</sup> R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata* (Jakarta, 2004) Hal. 51

membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian kemudian diatur secara lebih khusus (*specialis*) dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) sebagaimana pula dimuat dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang merumuskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri; serta

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian tersebut juga dilengkapi dengan dua alasan lainnya yang tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni:

- g. Suami melanggar taklik-talak; dan
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian seperti yang diuraikan di atas merupakan dasar yang dapat diajukan pemohon perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat untuk mengajukan permohonan atau gugatan cerainya sehingga dapat dikabulkan oleh pengadilan yang bersangkutan.

Secara umum, alasan-alasan perceraian yang diuraikan tersebut meskipun dikelompokkan dalam beberapa jenis alasan-alasan, namun pada dasarnya masih saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain, yakni berupa hubungan kausalitas atau sebab-akibat, di mana salah satu alasan perceraian tersebut dapat menjadi penyebab dan/atau dapat pula menjadi akibat dari alasan perceraian yang lainnya.

Hal inilah yang menyebabkan permohonan perceraian yang diajukan di hadapan pengadilan seringkali bersifat kumulatif atau mendasarkan permohonannya berdasarkan dua atau lebih alasan

perceraian, meskipun sebenarnya permohonan dengan dasar satu alasan perceraian saja cukup menjadi pertimbangan majelis hakim pengadilan yang bersangkutan untuk mengabulkan perceraian yang dimohonkan (bersifat alternatif)<sup>68</sup>.

Dalam kenyataannya di masyarakat, dari alasan-alasan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat salah satu alasan perceraian yang paling sering digunakan dalam permohonan perceraian di hadapan pengadilan, yakni alasan karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi cekcok atau perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*Onheerbare Tweespalt*).

Fenomena tingginya angka perceraian karena alasan cekcok terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*) tersebut juga terjadi dalam lingkup wewenang Pengadilan Agama Makassar, seperti yang ditunjukkan dalam data yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Makassar mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Makassar tahun 2012 dan 2013 berikut:

---

<sup>68</sup> Simpulan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 9 Januari 2014.

**Tabel 3: Faktor-faktor Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama  
Makassar Tahun 2012 dan 2013<sup>69</sup>**

No.	Faktor-faktor Penyebab Perceraian	Tahun	
		2012	2013
1.	Moral	195	353
2.	Meninggalkan	302	296
3.	Kawin di Bawah Umur	0	0
4.	Menyakiti	170	183
5.	Dihukum	0	0
6.	Cacat Biologis	0	4
7.	Terus-Menerus	654	604
8.	Lain-lain	0	27

Merujuk dari data yang ditampilkan pada tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa perceraian dengan faktor atau alasan cekcok terus-menerus adalah yang paling banyak terjadi di kota Makassar dalam kurun waktu tahun 2012 dan 2013, jauh melebihi jumlah perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor atau alasan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa cekcok terus-menerus merupakan alasan dominan yang digunakan oleh masyarakat ketika mengajukan permohonan cerai, yang

---

<sup>69</sup> Diolah dari data terbitan Pengadilan Agama Makassar, "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Makassar Bulan Januari s/d Desember 2012" dan "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Makassar Bulan Januari s/d Desember 2013" (Diperoleh pada 9 Januari 2014)



menandakan bahwa percekcoan dalam hubungan rumah tangga seringkali tidak mampu diselesaikan hingga akhirnya berujung perceraian.

Mengingat bahwa pada dasarnya percekcoan dalam hubungan rumah tangga merupakan hal yang biasa atau lazim terjadi, namun apabila justru banyak diajukan dalam persidangan permohonan perceraian, maka secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa usaha untuk mempertahankan prospek keberlanjutan ikatan perkawinan ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga cenderung kurang menjadi perhatian. Ini dapat pula menunjukkan bagaimana lemahnya atau kurang berperannya mediasi sebagai media atau penengah untuk menemukan titik damai antara kedua belah pihak ketika terjadi perseteruan, hingga akhirnya perceraian menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh.

Cekcok terus-menerus pada dasarnya memiliki cakupan pengertiannya yang luas. Cakupan pengertian yang luas tersebut bermakna bahwa ada terlalu banyak hal yang dapat dikategorikan sebagai cekcok atau perselisihan, baik menyangkut ketidaksesuaian prinsip, perbedaan pandangan yang frontal, sikap yang bersinggungan, dan sebagainya. Luasnya cakupan inilah yang menyebabkan alasan perceraian ini cenderung paling banyak digunakan oleh pihak suami atau isteri untuk menjadi dasar permohonan perceraian di muka persidangan.

Tidak hanya itu, cekcok terus-menerus ini cenderung lebih mudah dibuktikan di hadapan persidangan jika dibandingkan dengan alasan perceraian lainnya, seperti penganiayaan, berpisah dalam waktu yang

lama, atau bahkan karena perzinahan yang kadang kala terlebih dahulu harus dibuktikan dalam peradilan pidanaanya. Pembuktian alasan perceraian karena cekcok terus-menerus acapkali cukup dilakukan dengan menunjukkan ketidakcocokan, ketiadaan rasa suka, dan/atau hilangnya keinginan untuk hidup bersama lagi dalam ikatan perkawinan seperti sebelumnya.

Faktor ingin-tidaknya salah satu atau kedua belah pihak (suami isteri) untuk meneruskan perkawinannya ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh untuk menentukan keberlanjutan ikatan perkawinan di antara mereka. Perkawinan kadang dirasa tidak dapat lagi diteruskan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk berpisah. Hal inilah yang menjadi salah satu patokan dalam menilai mudahnya pembuktian alasan perceraian karena percekcoakan terus-menerus.

Jika diamati dari segi kedudukannya terhadap alasan-alasan perceraian lainnya, alasan perceraian karena cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) merupakan alasan perceraian yang paling dominan digunakan dalam perkara perceraian pada peradilan agama. Sifat dominan alasan perceraian dalam artian ini didasarkan pada indikator dalam melihat bagaimana daya keterkaitan alasan perceraian tersebut dengan alasan perceraian lainnya. Percekcoakan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) pada hakikatnya bersifat akumulatif (melengkapi) dengan alasan perceraian lainnya, namun juga dapat menjadi alasan tunggal

(bersifat alternatif) dalam diajukannya permohonan perceraian. Dengan kata lain, pembuktian terjadinya percekcoan terus-menerus dalam rumah tangga cukup untuk menjadi satu-satunya dasar diputusnya perceraian oleh hakim bersangkutan, sekalipun juga dapat diajukan bersamaan dengan alasan perceraian lainnya untuk semakin menguatkan permohonan perceraian yang diajukan.

Bahkan lebih dari itu, secara logis, alasan perceraian karena percekcoan terus-menerus ini merupakan alasan yang paling lazim digunakan karena ketidakmungkinan membina rumah tangga jika terjadi perselisihan terus-menerus ini. Hal tersebut disebabkan karena percekcoan terus-menerus ini tidak hanya mencakupi pada perpisahan secara fisik atau lahiriah, melainkan juga bertendensi pada perpecahan secara psikis, emosional, atau batiniah antara suami isteri. Sehingga percekcoan inilah yang akan sangat berpengaruh baik secara fisik maupun psikis terhadap kedua belah pihak dalam mengaruhi biduk rumah tangganya.

Alasan perceraian karena cekcok terus-menerus (*onheelbare tweespalt*) merupakan alasan perceraian yang paling sering atau dominan terjadi di masyarakat. Kondisi faktual tersebut didasari dari kenyataan bahwa perselisihan terus-menerus bercikal bakal dari pertengkaran-pertengkaran baik dalam intensitas kecil atau pun besar yang sangat rentan terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang tidak mampu

terselesaikan dengan baik. Perselisihan ini sangat wajar terjadi, hanya penyebab terjadinya yang cenderung berbeda-beda.

Terjadinya perceraian dengan alasan cekcok atau perselisihan terus-menerus secara umum dapat disebabkan oleh alasan-alasan perceraian lainnya sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaannya, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Akan tetapi, jika dilihat secara khusus, ada tiga penyebab terjadinya percekcoan atau perselisihan terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga, yakni sebagaimana dimuat dalam data yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Makassar periode tahun 2012 dan 2013 mengenai faktor penyebab percekcoan terus-menerus berikut:

**Tabel 4: Faktor Penyebab terjadinya Percekcoan Terus-Menerus dalam Perkara Perceraian yang Diterima pada Pengadilan Agama Makassar tahun 2012-2013<sup>70</sup>**

No.	Faktor Penyebab Percekcoan Terus-Menerus	Tahun	
		2012	2013
1.	Politis	0	0
2.	Gangguan Pihak Ketiga	60	176
3.	Tidak Ada Keharmonisan	594	428
<b>T o t a l</b>		654	604

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

Dari data yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa kecenderungan terjadinya cekcok atau perselisihan terus-menerus dalam suatu kehidupan berumah tangga, paling banyak disebabkan oleh tidak adanya lagi keharmonisan dalam hubungan yang dijalin antara suami dan isteri. Ketidakharmonisan dalam keluarga pada dasarnya merupakan titik puncak dari perselisihan-perselisihan yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang sering kali muncul namun tidak menangani penanganan secara optimal.

Hal ini menyebabkan perselisihan tersebut kadang kala menghilang namun timbul kembali oleh perihal yang sama. Sehingga sebenarnya dapat dikatakan bahwa perselisihan menyangkut hal yang sama yang muncul-tenggelam dalam keluarga merupakan percekocokan yang berlarut-larut dan terjadi secara terus-menerus, hingga akhirnya mengerucut pada ketidakharmonisan di dalam keluarga tersebut.

Ketidakharmonisan ini memberikan perasaan yang tidak nyaman baik untuk salah satu pihak maupun keduanya (suami dan isteri) ketika terjadi interaksi di antara mereka. Hal tersebutlah yang kemudian mendorong salah satu atau kedua belah pihak tersebut untuk melakukan perceraian sebagai upaya menghindari interaksi yang tidak menyenangkan tersebut secara mutlak.

Di lain sisi, dengan tetap merujuk pada data yang ditunjukkan dari tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa faktor lain yang sangat memengaruhi terjadinya percekocokan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi

dalam kehidupan rumah tangga, yakni karena adanya pihak ketiga yang menjadi pemicu pecahnya hubungan antar suami-isteri dalam suatu keluarga. Perkawinan pada dasarnya merupakan ikrar suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling menguatkan cinta di antara mereka melalui ikatan rumah tangga. Dengan kata lain, perkawinan dilakukan atas dasar cinta, sehingga manakala salah satu pihak atau keduanya (suami-isteri) mulai goyah dalam mempertahankan perasaan cinta tersebut, maka perceraian pun dapat menjadi jalan terakhir bagi hubungan mereka.

Salah satu bentuk goyahnya perasaan tersebut, adalah ketika perasaan cinta tersebut mulai terbagi ke orang yang lain, yang menyebabkan muncul kecemburuan oleh suami atau isteri, yang berujung pada terjadinya cekcok secara terus-menerus. Cekcok tersebut terjadi secara terus-menerus oleh karena berkurangnya rasa percaya satu sama lain, sehingga menjadi mudah terjadi kesalahpahaman atau ketidaksesuaian di antara keduanya. Hal inilah yang mendorong terjadinya perceraian dalam keluarga.

Berkaitan dengan penyebab atau faktor politis yang dapat memengaruhi terjadinya perselisihan terus-menerus dalam keluarga memang sangat jarang terjadi. Hal ini disebabkan faktor politis tersebut biasanya telah dibicarakan atau disepakati sejak awal sebelum dilakukan perkawinan, sehingga setelah perkawinan pun, kecenderungan politis ini

pun bersifat konstan (tetap) dan jarang menimbulkan perselisihan di antara suami-isteri dalam rumah tangga.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian saling berhubungan satu sama lain, maka demikian halnya dengan alasan perceraian karena cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*). Alasan perceraian karena percekcoakan terus-menerus memiliki hubungan sebab-akibat dengan alasan perceraian lainnya, dimana 80% responden penelitian karya tulis skripsi ini lebih mengidentifikasikannya sebagai akibat dari alasan atau faktor perceraian lainnya, sedangkan 20% responden lainnya menempatkannya sebagai penyebab terhadap alasan atau faktor perceraian lainnya<sup>71</sup>.

Dengan kecenderungannya sebagai akibat dari alasan atau faktor penyebab perceraian lainnya, percekcoakan terus-menerus dapat menjadi tolok ukur nyata bagaimana suatu ikatan perkawinan dapat terus dipertahankan atau tidak. Dengan kata lain, berbagai alasan atau faktor penyebab terjadinya perceraian akan mencuat dengan terjadinya perselisihan dalam hubungan rumah tangga yang tidak mampu dirukunkan kembali.

Dari berbagai uraian di atas, dapat diidentifikasi bahwa alasan perceraian karena percekcoakan terus-menerus sangat memengaruhi

---

<sup>71</sup> Hasil penelitian pada tanggal 9 Januari 2014 di Pengadilan Agama Makassar dengan responden yang merupakan hakim pada Pengadilan Agama Makassar.

faktor terjadinya perceraian secara menyeluruh. Perselisihan terus-menerus yang diajukan dalam persidangan, merupakan tonggak nyata untuk mengetahui bagaimana ikatan lahir batin dalam suatu hubungan rumah berjalan dalam rangka mencapai tujuannya, yakni untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera. Sehingga wajarlah, jika alasan perceraian karena perselisihan terus-menerus ini menjadi alasan perceraian yang paling banyak terjadi dan paling dominan diajukan di hadapan pengadilan yang berwenang.

**B. Peranan Hakim dalam Mengidentifikasi Cekcok Terus-Menerus yang Tidak Dapat Didamaikan Lagi (*Onheelpbare Tweespalt*) sebagai Alasan Perceraian dalam Proses Peradilan Agama**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh jika ikatan perkawinan yang dijalin dianggap tidak dapat lagi untuk diteruskan. Dalam prosesnya, sebelum salah satu pihak ingin mengajukan perceraian di hadapan pengadilan, haruslah ada alasan dan keyakinan yang sangat kuat bahwa ikatan perkawinan tersebut memang sudah tidak dapat disatukan atau diteruskan lagi, setelah berbagai upaya yang telah diusahakan sebelumnya.

Apabila suatu perkara perceraian diajukan ke persidangan, hakim pengadilan agama wajib terlebih dahulu berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa. Dalam praktik selama ini, hakim mempersilakan kedua



pihak dalam suatu jangka waktu tertentu yang relatif singkat untuk mengusahakan sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Dalam proses ini, hakim umumnya bersifat pasif. Peran hakim terbatas apada memberikan nasihat atau petuah saja. Pada umumnya, suatu perkara baru diajukan ke pengadilan setelah semua upaya yang dilakukan sebelumnya (di luar pengadilan) tidak membawa hasil. Jika terdapat perdamaian, maka dibuat suatu akta perdamaian yang mempunyai kekuatan seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan pasti. Jika pihak yang berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa mereka seperti dianjurkan oleh hakim dalam persidangan, maka proses persidangan di mulai sampai ada keputusan.

Secara yuridis-normatif, dalam upaya perdamaian sebelum lahirnya PERMA No. 2 tahun 2003 yang diganti dengan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi, hakim yang senantiasa berupaya mendamaikan para pihak yang bersengketa, dapat pula bertindak seolah-olah sebagai psikolog sehingga hakim dengan mudah membaca para pihak yang bersengketa dengan segala latar belakangnya (duduk persoalan sengketa, latar belakang keluarga, status sosial, dan sebagainya). Dengan kata lain, hakim sangat berperan penting dalam usaha menemukan kebenaran-kebenaran yang terjadi menyangkut perkawinan pihak-pihak yang bermohon perceraian, juga sekaligus melakukan upaya mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai tersebut.

Dalam perkara umum, setelah upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, para hakim tidak akan berusaha lagi untuk mendamaikan pihak yang berperkara. Kendati demikian, dalam perkara perceraian, sekalipun upaya perdamaian awal yang berusaha disarankan hakim tidak berhasil, hakim biasanya tetap dapat melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak (suami dan isteri) selama persidangan berlangsung, apabila baru diketemukan hal-hal yang menurut hakim masih berpotensi untuk menyelamatkan ikatan perkawinan dalam keluarga tersebut.

Dari uraian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian di persidangan, hakim senantiasa menjalankan perannya untuk mengungkap kebenaran yang terjadi serta berusaha mendamaikan pihak suami dan isteri yang berperkara, di mana dalam upaya tersebut, hakim mempertimbangkan indikator-indikator atau faktor-faktor tertentu yang dapat menjadi acuan untuk melihat perceraian yang diajukan tersebut serta potensi dipertahankannya ikatan perkawinan antara suami isteri tersebut.

## **1. Peranan Hakim dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian pada Peradilan Agama**

Pada peradilan agama yang memiliki jumlah penerimaan perkara perceraian yang sangat besar, para hakim benar-benar dituntut untuk menjalankan perannya secara optimal. Dalam proses pemeriksaan

perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus di hadapan persidangan peradilan agama, hakim memiliki peranan utama, yakni:

**a. Mengidentifikasikan tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan**

Perceraian pada dasarnya dilakukan apabila tujuan dasar perkawinan yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah, dan rahmah) tidak tercapai atau tidak lagi memberikan manfaat bagi pihak suami dan/atau isteri. Dengan kata lain, perceraian dapat dilakukan jika ikatan perkawinan yang dijalani cenderung memberikan mudarat atau dampak buruk yang lebih besar ketimbang manfaatnya.

Yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu: (1) berlangsung seumur hidup, (2) cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan (3) suami istri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniyah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan esensi kebutuhan rohaniyah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri<sup>72</sup>.

---

<sup>72</sup> Salim HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). 2009. Sinar Grafika. Jakarta

Tidak tercapainya nilai kebahagiaan dan kesejahteraan antara suami dan/atau isteri dalam keluarga mengindikasikan bahwa tujuan perkawinan tidaklah tercapai, sehingga upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perceraian. Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, namun apabila kebahagiaan atau kesejahteraan dalam keluarga tidak tercapai, maka tujuan perkawinan yang kekal tersebut dengan terpaksa harus dikesampingkan.

Perceraian harus dilakukan karena dikhawatirkan apabila dipaksakan untuk tetap diteruskan, justru akan berdampak buruk atau menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan tersebut, menjadi salah satu tolok ukur dasar bagi hakim Pengadilan Agama untuk menentukan layak atau tidaknya permohonan perceraian dikabulkan<sup>73</sup>.

#### ***b. Memberikan Nasihat-nasihat Selama Persidangan***

Salah satu perbedaan utama peranan hakim dalam perkara perceraian yang membedakannya dengan jenis perkara lainnya, yakni menyangkut intensitas pemberian nasihat yang dilakukan oleh hakim tersebut. Dalam perkara umum, upaya nasihat-menasihati dalam rangka mencapai perdamaian pihak berperkara, utamanya dilakukan dalam tahap mediasi, dimana ketika tidak tercapai perdamaian, hakim secara umum

---

<sup>73</sup> Simpulan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 9 Januari 2014

akan mengurangi intensitas pemberian nasihat pendamaian kepada pihak berperkara tersebut. Hal tersebut berbeda dalam perkara perceraian, dimana sekalipun upaya perdamaian awal yang berusaha dilakukan hakim tidak berhasil, hakim biasanya tetap dapat melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak (suami dan isteri) selama persidangan berlangsung. Dengan kata lain, dalam perkara perceraian, pemberian nasihat cenderung lebih intens dilakukan dengan maksud membuka ruang tercapainya perdamaian antara pihak suami dan isteri yang sebelumnya terikat dalam perkawinan, dimana peluang untuk saling bertoleransi dan mencapai titik temu sehingga perceraian dapat dihindarkan masihlah cukup besar.

Proses mediasi yang dibarengi dengan pemberian nasihat-nasihat selama persidangan tersebut, merupakan salah satu perwujudan nyata dari upaya mempersukar terjadinya perceraian. Dalam artian bahwa, sebelum perceraian diputus, harus dilakukan berbagai upaya yang optimal untuk menyelamatkan ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Sehingga kalau pun suatu ikatan perkawinan memang pada akhirnya harus diputus bercerai, setidaknya telah dilakukan upaya optimal oleh pengadilan agama untuk mencegahnya.

Upaya ini pulalah yang dapat mengindikasikan seberapa ikatan perkawinan tersebut masih dapat diteruskan atau tidak. Dalam pemberian nasihat-nasihat dalam persidangan, hakim akan melihat potensi diteruskannya perkawinan tersebut. Jika pada akhirnya perceraian tetap

terjadi, hal itu menunjukkan bahwa ikatan perkawinan tersebut memang sudah tidak dapat diteruskan lagi.

***c. Menilai Pembuktian Alasan Perceraian yang Diajukan, Khususnya Unsur Cekcok Terus-menerus***

Dalam rangka menjalankan tugasnya, yakni untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian, hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan bagaimana pencapaian tujuan perkawinan dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani tersebut, setelah memeriksa berbagai syarat formal permohonan perceraian yang diajukan. Selain itu, hal utama yang menjadi landasan bagi hakim untuk memutus suatu perkara perceraian adalah adanya alasan-alasan yang menjadi dasar dilakukannya perceraian. Alasan-alasan tersebut haruslah bersifat logis dan mampu dibuktikan di hadapan persidangan. Pembuktian alasan perceraian tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan hakim bahwa perkawinan tersebut memang sudah seharusnya diputus bercerai. Alasan perceraian tersebut tidak boleh bersifat melawan hukum.

Dalam perkara perceraian, alat bukti utama yang digunakan adalah keterangan keterangan saksi yang paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapai perspektif yang objektif dalam menilai kebenaran alasan perceraian tersebut terjadi. Saksi tersebut juga dimungkinkan berasal dari keluarga kedua belah pihak, untuk semakin menguatkan pembuktian alasan perceraian tersebut di muka persidangan.

***d. Menilai kelayakan dapat diteruskan atau tidaknya ikatan perkawinan, serta melakukan upaya pendamaian selama persidangan***

Aspek lainnya yang juga menentukan dikabulkan atau tidaknya suatu permohonan perceraian adalah keyakinan hakim. Berbagai proses pembuktian yang dilakukan di muka persidangan pada akhirnya juga harus dilengkapi oleh keyakinan hakim untuk melihat bahwa perkawinan tersebut memang sudah tidak dapat dilanjutkan lagi hingga sepatutnya memutus perceraian tersebut. Meskipun cenderung bersifat subjektif, keyakinan hakim ini pada dasarnya tetap didasarkan atas fakta-fakta yang muncul pada persidangan, sehingga hakim mampu menilai tentang kebenaran yang sebenarnya terjadi sebagai pertimbangan untuk memutus suatu perkara perceraian dalam peradilan agama.

Keyakinan hakim ini bertolak pada berbagai proses pembuktian selama persidangan, termasuk dalam proses jawab-menjawab yang melibatkan penggugat dan tergugat, sehingga hakim dapat melihat keadaan kedua belah pihak, baik secara fisik maupun psikis. Proses tersebut, selain memberikan penilaian secara logis bagi hakim, juga memunculkan penilaian secara moral atau berdasarkan nurani hakim yang melahirkan keyakinan hakim untuk memutus layak tidaknya dikabulkannya perceraian yang dimohonkan.

## **2. Indikator yang Memengaruhi Putusnya Perceraian dengan Alasan Cekcok Terus-Menerus yang Tidak Dapat Didamaikan Lagi (*Onheelbare Tweespalt*) oleh Hakim Peradilan Agama**

Merujuk pada ketentuan mengenai alasan perceraian yang menjadi dasar utama bagi hakim untuk memutus perkara perceraian, terdapat satu alasan yang sering menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Menurut ketentuan ini, jika suami dan isteri cekcok terus menerus dan tidak mungkin rukun kembali (*onheelbare tweespalt*), salah satu atau kedua belah pihak bisa mengajukan cerai. Banyak pihak yang menganggap bahwa alasan perceraian ini mengandung cakupan pengertian atau lingkup yang sangat luas, sehingga dikabulkannya perceraian disebabkan alasan ini merupakan hal yang relatif dan bahkan bersifat 'karet' karena tidak memiliki tolok ukur yang baku, sehingga cenderung mudah untuk diajukan di depan persidangan.

Pengaturan mengenai ketentuan perceraian karena alasan percekcoakan atau perselisihan terus-menerus ini merupakan hal yang sangat urgen atau penting dilakukan. Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya perselisihan merupakan hal yang sering muncul dalam hubungan rumah tangga, sehingga apabila tidak ada ketentuan yang jelas dalam mengaturnya, alasan perceraian ini akan sulit untuk diidentifikasi unsur terus-menerusnya, juga menyangkut unsur bahwa perkawinan yang terjalin tidak akan dapat dirukunkan kembali. Ketidakjelasan pengaturan



ini akan menyebabkan alasan perceraian ini akan menjadi terlalu mudah untuk diajukan di hadapan pengadilan.

Proses penegakan hukum perdata, baik melalui peradilan umum maupun peradilan agama tidak mengatur secara rinci mengenai tata cara, mekanisme dan prosedur penegakan hukum perceraian akibat alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Keterbatasan rincian aturan inilah yang memberikan peran besar kepada para hakim dalam proses peradilan, khususnya peradilan agama untuk mengidentifikasikan perceraian dengan alasan percekcoan terus-menerus tersebut.

Meskipun secara personal, cara pandang hakim sangat mungkin berbeda-beda, namun dengan pengalaman dan sifat keilmuannya, termasuk dalam melakukan konstruksi dan interpretasi hukum, hakim peradilan agama memiliki kecenderungan yang serupa dalam menilai, memeriksa, dan memutus suatu perkara perceraian. Kecenderungan tersebut adalah menyangkut tolok ukur yang menjadi acuan bagi para hakim peradilan agama dalam menilai perkara perceraian tersebut. Meskipun sangat dimungkinkan terjadi bahwa hasil penilaian hakim terhadap acuan tersebut dapat berbeda-beda, yang pada akhirnya melahirkan implikasi hukum berupa putusan yang berbeda-beda.

Perceraian dengan alasan percekcoan terus-menerus belum memiliki tolok ukur yang jelas secara yuridis. Namun jika didasarkan pada kecenderungan hakim yang memiliki acuan penilaian mengenai

perceraian tersebut, maka dapat diidentifikasi bagaimana pertimbangan hakim dan putusannya terhadap perceraian dengan alasan percekcoan terus-menerus. Acuan tersebut sangat menentukan peranan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian dengan alasan percekcoan terus-menerus.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Pengadilan Agama Makassar, dapat diidentifikasi adanya faktor-faktor atau indikator-indikator yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian dengan alasan percekcoan terus-menerus tersebut, yang beberapa di antaranya berlandaskan atas yurisprudensi yang telah diterapkan sebelumnya. Indikator-indikator atau acuan tersebut, adalah:

***a. Terbuktinya alasan percekcoan terus-menerus, baik secara fisik maupun psikis***

Perkawinan sejatinya merupakan ikatan lahir batin antara suami dan isteri. Oleh karena itu, indikasi terjadinya percekcoan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian juga akan terlihat secara lahiriah (fisik) dan juga batiniah (psikis). Bukti secara fisik dapat langsung disaksikan oleh hakim pengadilan yang bersangkutan, namun secara psikis, hakim memerlukan suatu bentuk penelusuran melalui berbagai keterangan yang diutarakan oleh kedua belah pihak. Hilangnya rasa cinta, adanya tekanan mental, serta ketidaksukaan terhadap sifat dan perilaku

pasangan dapat menjadi tolok ukur hakim untuk melihat bagaimana perselisihan terus-menerus dalam suatu rumah tangga terjadi.

***b. Perselisihan bukan dilihat dari penyebabnya, tapi kenyataannya***

Untuk memutus suatu perceraian dengan alasan percekocan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, cukup dilihat bagaimana kenyataan perselisihan terus-menerus tersebut terjadi, tanpa harus mengupas sebab-musababnya. Hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3180/Pdt./1985, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.<sup>74</sup>

Juga dengan yurisprudensi Mahkamah Agung: No. 90 K / AG / 1993 Tanggal 24 Juni 1994, yang mengamanatkan bahwa perceraian dengan alasan percekocan terus-menerus (isi pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan) terpenuhi apabila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah<sup>75</sup>.

Meskipun demikian, dalam hal perkara dimana petitum gugatan yang diajukan juga memuat tentang penentuan tanggung jawab setelah

---

<sup>74</sup> Soedharyo Soimin, *Op.cit.* Hal. 243

<sup>75</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta, 2008), Hal. 115

perceraian, seperti untuk mencari *nusyuz* (pihak yang bersalah) untuk menentukan nilai *mut'ah* dan nafkah *iddah*, maka hakim juga harus mencari sebab-sebab terjadinya perselisihan terus-menerus tersebut, termasuk pihak mana (suami atau isteri) yang bersalah atau berperan besar menyebabkan terjadinya percekcoan terus-menerus yang berujung perceraian. Misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung: No. 441 K / AG / 1996 Tanggal 22 September 1998, yang memuat ketentuan bahwa jika faktor penyebab perceraian dari pihak suami, maka wajiblah ia memberikan nafkah/*mut'ah* kepada istrinya selama belum menikah lagi<sup>76</sup>.

***c. Tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan dan kemungkinan diteruskannya perkawinan tersebut***

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa nilai tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan merupakan salah satu tolok ukur bagi hakim pengadilan agama untuk melihat dapat atau tidaknya percekcoan tersebut dapat didamaikan lagi. Tujuan perkawinan yang kekal dan sejahtera, apabila tidak tercapai, merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut tidak dapat lagi diteruskan.

Meskipun demikian, untuk memutus suatu perceraian dengan alasan cekcok terus-menerus (*onheelbare tweespalt*), hakim pengadilan agama tetap memperhatikan dengan matang kemungkinan masih dapat diteruskannya ikatan perkawinan yang dimohon bercerai tersebut. Dari

---

<sup>76</sup> *Ibid.* Hal. 114

berbagai proses pembuktian yang ada, hakim dapat menilai dapat diteruskan atau tidaknya ikatan perkawinan tersebut. Jika dirasa bahwa perkawinan tersebut sebenarnya masih dapat dilanjutkan, hakim biasanya akan lebih mengupayakan perdamaian antara suami-isteri yang hendak bercerai tersebut.

***d. Intensitas terjadinya cekcok***

Percekcokan merupakan hal yang lumrah terjadi dalam hubungan rumah tangga, sehingga tidak dapat langsung dijadikan landasan dikabulkannya perceraian. Perceraian dengan alasan percekcokan terus-menerus merupakan perceraian yang diakibatkan pertengkaran atau perselishan yang berlangsung terus-menerus atau dalam intensitas yang tinggi. Dalam artian bahwa percekcokan tersebut terjadi secara berlarut-larut dan tidak dapat diakhiri.

Dalam hal lain, perceraian juga dapat diputus dengan alasan percekcokan terus-menerus meski hanya terjadi dalam waktu yang singkat. Perceraian tersebut dapat dikabulkan oleh hakim, ketika cekcok tersebut baru terjadi namun merupakan cekcok yang hebat dan berpotensi merusak hubungan perkawinan ke depannya, sehingga dapat dinilai layak untuk diputus bercerai.

***e. Lamanya perpisahan (tidak tinggal bersama)***

Apabila suami dan isteri tidak lagi tinggal bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, maka dapat dinilai bahwa ikatan perkawinan di

antara mereka mulai memudar sehingga layak diputus bercerai. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 238 PK/Pdt/2004, Mahkamah Agung menegaskan ketidakcocokan yang tidak bisa diatasi lagi (*onheelpbare tweespalt*) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai, dengan pertimbangan fakta bahwa pemohon dan termohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama. Kondisi ini membuktikan suami termohon dan pemohon perceraian sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami isteri.

***f. Masih atau tidaknya lagi ada hubungan/interaksi***

Potensi masih dapat diteruskan atau tidaknya suatu ikatan perkawinan juga dapat dilihat dari masih atau tidaknya ada hubungan atau interaksi antara suami isteri dalam rumah tangga tersebut. interaksi atau hubungan yang benar-benar terputus, termasuk dalam hal tidak adanya lagi hubungan komunikasi antara suami-isteri mengindikasikan bahwa ikatan perkawinan di antara mereka merenggang dan dapat berujung pada terjadinya perceraian.

Kendati demikian, indikasi bahwa suatu perkawinan masih dapat diselamatkan meskipun telah diajukan permohonan perceraian, juga dapat dilihat dari pola interaksi yang terjadi di antara keduanya. Menurut keterangan Hakim Pengadilan Agama yang menjadi responden dalam penelitian karya tulis skripsi ini, dalam beberapa kasus atau perkara perceraian, ditemukan bahwa ternyata kadang kala masih ada

pasangan suami-isteri yang telah mengajukan permohonan perceraian di muka pengadilan, nyatanya masih menjalin hubungan berupa pertemuan dan/atau komunikasi satu sama lain di luar persidangan. Hal ini merupakan indikasi bahwa masih ada potensi dirukunkannya kembali kedua belah pihak tersebut, sehingga perceraian dapat dihindarkan. Dengan kata lain, ada atau tidaknya hubungan atau interaksi antar pihak di luar persidangan antar suami-isteri yang mengajukan permohonan perceraian, merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan hakim pengadilan agama untuk mengupayakan kembali tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak tersebut, sehingga tidak perlu dilakukan perceraian.

***g. Keinginan salah satu atau kedua belah pihak untuk berpisah***

Putusnya perkawinan karena perceraian pada dasarnya dapat dilakukan hanya dengan mempertimbangkan keinginan salah satu pihak yang bersikeras untuk bercerai. Artinya bahwa, perceraian tidak harus menunggu kerelaan pihak lainnya untuk menerima permohonan perceraian dari pasangannya, melainkan cukup dengan melihat kehendak salah satu pihak benar-benar telah ingin bercerai. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan lahir batin antara suami dan isteri, sehingga apabila salah satu pihak (suami atau isteri) ingin melepaskan ikatan tersebut, maka nilai ikatan dalam

perkawinan tersebut jelas tidaklah dapat diteruskan, meskipun pihak lainnya masih ingin mempertahankannya.

Demikian halnya dengan perceraian dengan alasan cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*), dimana hakim dapat mengabulkan suatu perceraian dengan pertimbangan utama bahwa salah satu pihak memang telah memiliki tekad yang bulat untuk bercerai. Sehingga, kalau pun nantinya perkawinan tersebut diteruskan, justru akan membawa dampak buruk bagi kedua belah pihak. Maka layaklah untuk diputus bercerai.

#### ***h. Kesiediaan untuk berubah demi meneruskan rumah tangga***

Perceraian karena percecokan terus-menerus memang dapat disebabkan salah satu pihak memiliki perangai yang tidak disukai oleh pasangannya, sehingga pasangannya tersebut ingin bercerai. Dalam hal ini, hakim dapat menilai bahwa perceraian dapat dihindarkan apabila salah satu pihak tersebut berjanji dan mampu meyakinkan pasangannya untuk merubah perangai buruknya tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud toleransi satu sama lain dalam rumah tangga, yang mengindikasikan bahwa ikatan perkawinan antara suami isteri dalam keluarga tersebut masih dapat diteruskan.

Misalnya, dalam perkara permohonan perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus yang merupakan akibat dari pihak suami yang sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Apabila suami tersebut



berjanji dan mampu meyakinkan isterinya bahwa ia akan berubah untuk tidak lagi pulang larut dan mabuk, maka hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut sebagai potensi untuk diteruskannya ikatan rumah tangga mereka.

***i. Kematangan suami-isteri dan faktor anak***

Kematangan atau kedewasaan pihak suami dan/atau isteri dalam rumah tangga juga menjadi tolok ukur bagi hakim pengadilan agama untuk menilai apakah ikatan perkawinan di antara mereka dapat diteruskan atau tidak. Kemampuan untuk saling memahami dan bertoleransi satu sama lain, dapat menjadi bahan pertimbangan hakim untuk melakukan upaya perdamaian di antara pasangan tersebut.

Faktor anak pun turut memengaruhi bagaimana pasangan suami isteri tersebut memutuskan untuk bercerai. Biasanya, pasangan yang telah memiliki anak akan melakukan pertimbangan yang lebih mendalam sebelum akhirnya benar-benar memutuskan untuk bercerai. Hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan bahwa perceraian yang dilakukan nantinya juga akan memberikan dampak yang sangat besar bagi anak mereka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Alasan perceraian karena cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) merupakan alasan perceraian yang paling dominan digunakan dalam perkara perceraian dan pada hakikatnya bersifat akumulatif (melengkapi) dengan alasan perceraian lainnya, namun juga dapat menjadi alasan tunggal (bersifat alternatif) dalam pengajuan permohonan perceraian pada Peradilan Agama.

Hakim Pengadilan Agama memiliki peranan dalam pemeriksaan perkara perceraian, antara lain berupa: (a) Mengidentifikasi tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan; (b) Memberikan Nasihat-nasihat Selama Persidangan; (c) Menilai Pembuktian Alasan Perceraian yang Diajukan, Khususnya Unsur Perselisihan Terus-menerus; dan (d) Menilai kelayakan dapat diteruskan atau tidaknya ikatan perkawinan, serta melakukan upaya pendamaian selama persidangan. Adapun faktor-faktor atau indikator-indikator yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian dengan alasan percekcoan terus-menerus, antara lain: (a) Terbuktinya alasan perselisihan terus-menerus, baik secara fisik maupun psikis; (b) Perselisihan bukan dilihat dari penyebabnya, tapi kenyataannya; (c) Tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan dan kemungkinan diteruskannya perkawinan tersebut; (d)

Intensitas terjadinya cekcok; (e) Lamanya perpisahan (tidak tinggal bersama); (f) Masih atau tidaknya lagi ada hubungan; (g) Keinginan salah satu atau kedua belah pihak untuk berpisah; (h) Kesiediaan untuk berubah demi meneruskan rumah tangga; dan (i) Kematangan suami-isteri dan faktor anak.

## **B. Saran**

Adapun saran yang hendak disampaikan penulis, yakni:

1. Hakim dengan berbagai sifat-sifat luhur dan kebijaksanaannya hendaknya terus menegakkan berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, beserta berbagai prinsip yang terdapat di dalamnya baik secara tersirat maupun tersurat, salah satunya yakni prinsip mempersukar perceraian dalam pengaturan tentang perkawinan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar hakim menjadi lebih selektif dan teliti dalam memutus perceraian yang dimohonkan. Sehingga tidak ada lagi kesan, 'hakim asal ketuk palu' dalam perkara perceraian. Dengan segala kebijaksanaannya, hakim memiliki cara pandang yang visioner untuk melihat prospek suatu ikatan perkawinan, sehingga hakim dengan berbagai nasihat-nasihatnya juga mampu menengahi perceraian tersebut, dan barulah memutus perceraian jika telah melalui berbagai proses penilaian dan pertimbangan yang didukung dengan keyakinan yang matang;

2. Pemerintah hendaknya segera membuat aturan baku mengenai ketentuan-ketentuan yang lebih merinci tentang perceraian, termasuk mengenai alasan-alasan perceraian. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap penafsiran yang terlalu luas mengenai hal yang sebelumnya masih bersifat ambigu atau multi tafsir. Sehingga nantinya, cakupan muatan yang terlalu luas tersebut tidak lagi menjadi salah satu pendorong terjadinya perceraian yang terlalu mudah dilakukan di kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdul Hanan. 2010. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Achmad Ali. 1997. *Menang dalam Perkara Perdata*. Ujung Pandang: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika
- Ahmad Kamil. dan M. Fauzan. 2008. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Syamsu Alam. 2005. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House
- Cik Hasan Bisri. 2000. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004. *Penerapan Hukum Acara*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Hilman Hadikusuma. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni
- Khoiruddin Nasution. 2005. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA
- Lili Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- M. Fauzan. 2005. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- M. Nur Rasaid. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 1993. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini

- Nurul Qamar. 2011. *Percikan Pemikiran tentang Hukum*. Makassar: Pustaka Refleksi
- R. Soepomo. 2002. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- R. Soeroso. 2010. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 4: tentang Pembuktian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Roihan A. Rasyid, 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sayuti Thalib. 2009. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Soedharyo Soimin. 1996. *Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta
- Sulaikin Lubis, dkk. 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

### ***Jurnal, Skripsi:***

- Emalisa Rauf, *Penerapan Hukum Pembuktian dalam Gugatan Perceraian dengan Alasan Zina di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2004)
- Karmilawati, *Peranan Alat-Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002)
- Rachmah, *Perbandingan Proses Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002)

### **Situs Internet:**

A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) Dikutip dalam Mushlih Al-Hafizh, "Pengertian Hakim", <http://www.referensimakalah.com/2013/07/pengertian-hakim.html> (Diakses pada 21 November 2013 Pkl. 12.05 WITA)

Bernard MT, "UU Perkawinan Tak Melindungi Perempuan", <http://forum.kompas.com/keluarga/42686-uu-perkawinan-tak-melindungi-perempuan.html> (Diakses pada 18 November 2013 Pkl. 09.51 WITA)

Damanhari Zuhri, "Wamenag: Angka Perceraian Masih Tinggi" (Agustus, 2013) <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/08/17/mrnkhr-wamenag-angka-perceraian-masih-tinggi> (Diakses pada 18 November 2013 Pkl. 10.00 WITA)

Edi Supriyadi, "Angka Perceraian di Indonesia capai angka 212.000 pertahun" (September 2013) <http://www.antarajambi.com/berita/301375/angka-perceraian-di-indonesia-capai-angka-212000-pertahun> (Diakses pada 18 November 2013 Pkl. 10.04 WITA)

Kartadikaria, "Kumpulan Surat dan Hadits Pernikahan" (November, 2007) <http://kartadikaria.wordpress.com/2007/11/17/kumpulan-surat-dan-hadist-pernikahan/> (Diakses pada 17 November 2013, Pkl. 15.44 WITA)

Tim Hukum Online, "Onheelpare Tweespalt dalam Doktrin dan Yurisprudensi" (April, 2012) <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7ab5bef40e2/ionheelbare-tweespalt-i-dalam-doktrin-dan-yurisprudensi> (Diakses pada 21 November 2013 Pkl. 19.30 WITA)

### **Kamus dan Perundang-undangan:**

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

*Burgelijk Wetboek (BW)* / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 38/PUU-IX/2011. [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



# LAMPIRAN

### DAFTAR NAMA RESPONDEN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makassar. Adapun dalam proses pengumpulan data dengan metode wawancara, peneliti mengambil sampel sebanyak 5 orang hakim Pengadilan Agama Makassar untuk merepresentasikan padangan umum dari keseluruhan hakim Pengadilan Agama, serta 2 orang dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang merupakan pakar dalam bidang Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata untuk merepresentasikan pandangan akademisi mengenai muatan penelitian yang dimaksud. Adapun daftar nama responden tersebut, yaitu:

No.	Nama Responden	Keterangan
1.	Drs. Muh. Iqbal, M.H.	Hakim Pengadilan Agama
2.	Dra. Hj. St. Aminah, M.H.	Hakim Pengadilan Agama
3.	Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama
4.	Drs. Mahmudin, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama
5.	Dra. Hj. Nurjaya, M.H.	Hakim Pengadilan Agama
6.	Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H, M.H.	Dosen / Akademisi
7.	Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H.	Dosen / Akademisi